

Declare Adalah Jurnal Ilmiah yang dikelola secara mandiri dan partisipatif oleh mahasiswa program studi Hubungan Internasional bersama Laboratorium HI Universitas Bosowa Makassar. Jurnal Declare terbit berkala tiga kali setahun pada bulan Mei Januari, dan September. Jurnal Declare membuka kesempatan kepada peneliti dan penstudi Hubungan Internasional untuk berpartisipasi guna mendorong pengembangan pengetahuan Studi Hubungan Internasional lebih luas. Kirimkan naskah artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai visi Jurnal kepada redaksi jurnal declare di alamat email jurnaldeclare@gmail.com

Diterbitkan oleh :
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa

Sekretariat : Jln. Urip Sumohardjo km4.
Gedung 1 lantai 1 Universitas Bosowa
Telepon : (+62) 811-4449-443
Email : jurnaldeclare@gmail.com



JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

DECLARE
The Epistemic Space



ISSN : 23385332

Declare

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Volume 2, Issue 2, Mei - Agustus 2017

PENGARUH PT. OKHISIN TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI FLORES TIMUR

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KESUKSESAN KOREAN WAVE KHUSUSNYA K-POP SEJAK TAHUN 2010

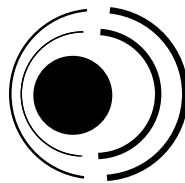
GERAKAN ISLAM NUSANTARA DALAM MENCEGAH AKSI TERORISME DI INDONESIA

DAMPAK GREEN TOURISM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TERNATE

UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN NELAYAN TRADISIONAL DI PERAIRAN AUSTRALIA

Volume 2, Issue 1, Mei - Agustus 2017

D *Declare* VOL. 2, Issue 2, Mei - Agustus 2017
Jurnal Hubungan Internasional
Universitas Bosowa Makassar



DECLARE
The Epistemic Space

Diterbitkan oleh:
Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Bosowa Makassar

Pedoman Penulisan Jurnal Declare

1. Artikel yang ditulis untuk Declare merupakan hasil pemikiran dan hasil penelitian dalam lingkup Ilmu Hubungan Internasional. Tulisan bukan hasil plagiasi dan belum pernah diterbitkan di media atau penerbitan lain (termasuk media online).
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 10 pts, spasi 1, ukuran kertas A4, dengan panjang artikel 4000-6000 kata / 15-20 halaman, tidak termasuk abstrak dan daftar pustaka). Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word. File tulisan dikirim sebagai attachment ke alamat **jurnaldeclare@gmail.com** beserta *curriculum vitae* penulis.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai, disertai judul pada masing-masing bagian artikel. Bagian pendahuluan disajikan tanpa judul bagian.
4. Sistematika artikel hasil penelitian adalah: judul, nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 200 kata) yang berisi tujuan, metode dan hasil penelitian (ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); kata kunci; pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; metode; hasil; bahasan utama (dapat dibagi ke dalam beberapa sub bagian); penutup atau kesimpulan; daftar pustaka (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
5. Judul artikel tidak melebihi 16 kata dan ditulis dengan huruf besar di tengah-tengah.
6. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama; nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Bagi naskah yang ditulis oleh sebuah tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat email untuk memudahkan komunikasi.
7. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau majalah ilmiah.
8. Menggunakan catatan perut untuk kutipan dengan format: ([Nama Belakang], [Tahun] : [Halaman (Jika ada)]). Contoh (Hasan, 2016:06)
9. Penyusunan daftar pustaka menggunakan APA (American Psychological Association) style dengan alamat website: <http://www.apastyle.org>
10. Tata cara penyajian kutipan, tabel dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Universitas Negeri Malang, 2000) atau mencontoh tata cara yang digunakan dalam artikel yang telah dimuat. Artikel berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris menggunakan ragam baku.
11. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (reviewer) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kompetensinya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari atau penyunting. Kepastian pemuatan dan penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis atau melalui surat elektronik (email).

Jurnal Hubungan Internasional

Declare

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Makassar
Volume 2, Issue 1, Januari - April 2017

Editorial Team

Tim Redaksi :

Finahliyah Hasan, S.IP., MA
Andi Norman
Sitti Nurbaya Ali
Wa Ode Kodrat Rahmatika
Muh.Ardha Salim

Reviewer :

Arief Wicaksono, S.Ip., MA
Zulkhair Burhan, S.IP., MA
Finahliyah Hasan, S.IP., MA
Beche Bt Mamma, S.Ip., MA
Fivi Elvira Basri, S.Ip., MA
Rosnani, S.Ip., MA
Asy'ari Mukrim, S.Ip., MA

Pengantar Redaksi

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmanirrahim,,segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam, sang pencipta alam semesta. atas berkat dan rahmatnyalah sehingga Journal Declare ini dapat selesai. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad SAW, yang telah menjadi pembimbing terbaik dalam setiap langkah. Journal Declare merupakan journal ilmiah yang di terbitkan oleh jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. journal Declare ini disusun oleh Mahasiswa dan Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar. Journal ini menerbitkan dua edisi setiap tahunnya. Declare memuat tulisan yang murni dari mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar dengan menggunakan penelitian secara ilmiah serta mengulas lebih mendalam permasalahan di lingkungan sekitar yang dapat dijadikan permasalahan bukan hanya berdampak lokal namun berdampak Global dengan menggunakan perspektif serta analisis khas mahasiswa Hubungan Internasional. Dalam edisi kali ini Declare berfokus pada isu Ekonomi Pariwisata, HAM, serta Budaya lokal yang menarik untuk dibaca dalam membuka wawasan lokal berdampak Global.

Akhir kata, tidak dipungkiri masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Journal ini, namun terlepas dari hal tersebut Journal Declare ini diharapkan dapat memberi banyak wawasan kepada seluruh pembaca akan seluk beluk permasalahan Dunia sehingga membuka lebih jauh wawasan diri tentang hal yang sedang terjadi.

Tim Redaksi

Daftar isi

Panduan Penulisan ~ iii

Editorial Team ~

Editorial Declare ~

Daftar isi ~iv

Daftar isi

Pengaruh PT. OKHISIN Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Flores Timur ~ 1

Sri Wahyuni

Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA

Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

Faktor-Faktor Pendukung Kesuksesan Korean Wave Khususnya K-POP Sejak Tahun 2010 ~ 16

Fadlun Arrayyan Bonde

Arief Wicaksono, S.Ip.,MA

Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA

Gerakan Islam Nusantara Dalam Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia ~ 23

Herwin

Arief Wicaksono, S.Ip.,MA

Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

Dampak Green Tourism Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate ~ 39

Fadhli Kasim

Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA

Arief Wicaksono, S.Ip.,MA

Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Permasalahan Nelayan Tradisional di Perairan Australia ~ 51

Wa Yanti

Beche Bt. Mamma, S.Ip.,MA

Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

PENGARUH PT. OKHISIN TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI FLORES TIMUR

Sri Wahyuni
Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA
Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

ABSTRAK

Pengembangan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim di wilayah investasi yang ditanamkan oleh investor sehingga mereka mampu mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupan. Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Pengaruh perusahaan terlihat pada kemajuan yang signifikan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial keagamaan. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif analisis, jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, yakni data yang diperoleh dari lembaga pemerintahan maupun swasta. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dan data yang penulis peroleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa peran PT.Okishin terhadap kesejahteraan masyarakat Larantuka, dan Bagaimana pengaruhnya PT.Okishin terhadap kesejahteraan masyarakat Larantuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PT. Okishin Flores di Kabupaten Flores Timur yang telah memberikan peran dan pengaruh yang baik seperti terbukanya lowongan kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat, mampu meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatnya pendapatan ekonomi bagi masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakatpun semakin meningkat.

Kata Kunci : PT Okhisin, Masyarakat, Flores Timur, Ekonomi

PENDAHULUAN

Hadirnya PT.Okishin yang beroperasi di wilayah Larantuka ,menambah deretan jumlah perusahaan asing yang telah beroperasi di wilayah Negara Indonesia sebagai sebuah konsekuensi yang harus diterima akibat dari pengaruh globalisasi yang mau tidak mau harus di jalani bangsa Indonesia dalam perarturan perdagangan internasional. Kehadiran perusahaan asing menambah pengaruh tahapan-tahapan budaya dan kebiasaan yang berdampak pada budaya lokal, serta keinginan negara produksi (MNCs) yang hanya mengeruk keuntungan produksi ekonomi semata tanpa mengindahkan masalah kesejahteraan masyarakat asli daerah di sekitar perusahaan tersebut. Kasus-kasus di kesampingkannya masalah kesejahteraan oleh perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.¹

Era globalisasi yang ada saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas antar negara. Masing-masing negara memilki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Globalisasi juga dibarengi dengan kemajuan teknologi. Disaat yang sama fenomena politik-ekonomi internasional mencatat perkembangannya yang ditandai dengan munculnya actor-actor non negara yang ikut memainkan peranan penting di dalam hubungan ekonomi lintas negara. Dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan negara. Pada pertengahan 1960-an di dunia ketiga sedang menggejala mengundang masuknya modal asing dalam bentuk Multinational Cooperations dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pertumbuhannya,

¹ Bob Sugeng Hadiwinata.2002. Politik Bisnis Internasional. Yogyakarta:Penerbit Kanisius,hal.113.

Sri Wahyuni

menciptakan lapangan kerja dan meraih teknologi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perkembangan dari sebuah kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan output dalam masyarakat dan mendorong peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Output yang beredar di masyarakat tersebut meliputi barang dan jasa (Sukirno,2000) Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tidak terlepas dari penanaman modal. Peran penanaman modal sendiri bertujuan untuk memperlancar kegiatan produksi maupun infrastruktur terutama bagi negara berkembang. Dimana hal ini dituntut untuk meningkatkan produksi dan infrastrukturnya guna mendorong peningkatan ekonomi.

Secara teori penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi/pertumbuhan ekonomi pada khususnya di daerah tuan rumah. Pemerintah menetapkan daerah berusahaan-perusahaan asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Secara formal berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.² Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Perlu diketahui besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi ini terutama dikabupaten flores timur adalah potensi kelautan, perikanan, pertanian dan lain sebagainya, membuat banyak perusahaan asing yang berdatangan untuk berinvestasi, terutama perusahaan dari Jepang. Pembahasan investasi asing tidak dapat dilepaskan dari peranan perusahaan multinasional. Potensi laut di Larantuka sebagian besar berasal dari Laut Flores, dan Laut Sawu, dimana jenis-jenis ikan ekonomis penting terdapat di perairan tersebut. Seperti ikan pelagis besar, pelagis kecil, demersal, dan cumi-cumi. Komoditi andalan perikanan laut Larantuka adalah Tuna, Cakalang, Cumi dan Mutiara.

Permasalahan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat terkait adanya PT OKISHIN di Larantuka dalam industri pembekuan ikan, sangatlah perlu diperhatikan karena dampak yang ditimbulkan sangat erat hubungannya dengan jalannya proses pada suatu industri. Sejumlah arus modal internasional dapat dilakukan dalam bentuk investasi langsung yang dapat diartikan, misalnya suatu Negara (kreditor) memberikan ataupun membeli beberapa saham obligasi dari Negara peminjam (debitor), namun sekarang ini ada bentuk lain investasi dari transaksi internasional yang lebih memadai, yaitu dengan proporsi total arus modal secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan multinasional melalui pembentukan anak cabang perusahaan di Negara lain.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penggambaran fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai hubungan perusahaan PT. OKISHIN dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang di timbulkannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta badan terkait lainnya.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1997 Tentang Penanaman Modal Asing

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan dan pengumpulan data-data yang berasal dari buku-buku, dokumen, buletin atau brosur, majalah, artikel dan surat kabar apapun laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti juga mendatangi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan terpadu kabupaten Flores Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur, dan PT.Okishin flores Kabupaten Flores Timur serta instansi yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran PT. Okishin Flores Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Flores Timur (Larantuka)

Tujuan sebuah negara terbentuk adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di jelaskan dalam pasal 1 bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang di lakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

PT. Okishin Flores berlokasi di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Pemilihan lokasi ini karena Kelurahan Waibalun adalah salah satu wilayah pesisir yang ada di Kabupaten Flores Timur yang sebagian besar masyarakatnya beroperasi sebagian nelayan tangkap, sehingga sangat

cocok untuk pengembangan usaha perikanan tangkap. Di samping itu tempat gedung atau kantor gedung PT. Okishin Flores adalah salah satu perusahaan milik PMA (Penanaman Modal Asing dari Jepang). PT.Okishin adalah salah satu perusahaan perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Flores Timur yang bergerak dalam usaha penangkapan ikan cakalang dan Tuna. PT. Okishin Flores di dirikan sejak tahun 2000 oleh PMA (Penanaman Modal Asing Jepang) dengan system sewa kapal, dan setelah tahun kemudian PT. OKishin Flores sudah bisa mengadakan kapal sendiri dan mulai berkembang sampai sekarang ini.³

Besarnya penanaman modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Namun tanpa di sadari keberadaan PT.Okishin memberikan peran yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena di ketahui bahwa kehadiran PT.Okishin ini memberi perubahan bagi masyarakat Flores Timur antara lain yaitu :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- *Terbukanya Lowongan Kerja*

Sebelum hadirnya PT.Okishin masyarakat Flores Timur banyak yang tidak mempunyai pekerjaan karena kekurangan lapangan kerja,Tapi, semenjak adanya PT.Okishin sebagian masyarakat Flores Timur kini mempunyai pekerjaan, dan PT.Okishin telah menampung banyak tenaga kerja, yang sampai hari ini sudah terhitung sebanyak 425 orang yang terbagi di beberapa unit kerja dengan spesifikasi pendidikan yang berbeda.

³[Http://www.go.id/flore timur/index2php?opyion=com_content&do_pdf=1&id=222](http://www.go.id/flore_timur/index2php?opyion=com_content&do_pdf=1&id=222) diakses 22 diakses 10 januari 2016

2. Peningkatan Keterampilan Masyarakat

- *Pelatihan Kepada masyarakat*

Pelatihan yang dimaksud disini adalah memberikan proses produksi cara menangkap dan mengelolah ikan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Pelatihan yang dimaksud disini adalah memberikan proses produksi cara menangkap dan mengelolah ikan dengan menggunakan teknologi yang canggih.⁴ Ada beberapa pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yaitu persiapan kapal merupakan salah satu sarana yang mutlak dalam operasi penangkapan ikan dalam hal ini merupakan satu kesatuan yang kompleks, karena apabila suatu system tidak berfungsi, maka akan mengakibatkan kegiatan penangkapan terhambat, yang perlu dipersiapkan adalah bahan bakar, mesin, dan semprotan air. Untuk kapal yang beroperasi di perairan Teluk Larantuka menggunakan tenaga kerja 13-23 orang.⁵

no	Jabatan	Jumlah Orang	Tugas
1	Kapten	1	Pemimpin Kapal
2	Comprador	2	Bagian Perlengkapan
3	Masinis	2	Nahkoda Kapal
4	Kepala kamar mesin	2	Bagian Permesinan
5	Oliman	2	Asisten Kepala Kamar
6	Boi – boi	2	Pelempar Umpan
7	Juru masak	2	Kepala bidang Dapur
8	Papalo dan manamo	2	Mengumpulkan Umpan
9	Pemancing	10	Memancing

⁴Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Flores Timur-Nusa Tenggara Timur

⁵Siprianus Paskalis, 2010. Dalam skripsi Investasi asing PT.Okishin Flores dalam upaya peningkatan pembangunan Kabupaten Flores Timur, Universitas 45 makassar hal 12-14

3. Meningkatkan Pendapatan Daerah

PT.Okishin di Flores Timur, telah banyak membantu pemerintah daerah larantuka dengan cara membayar pajak dan retribusi perusahaannya. Berdasarkan data Pajak dari PT.Okishin Flores Timur tercatat sejak 2010-2012, pendapatan pemerintah Kabupaten Flores Timur di dapat dari pajak penghasilan (PPH), dan yang terakhir adalah Retrebusi atau pungutan.

Hal ini sebagaimana yang di atur dalam Perda Kabupaten Flores Timur No.13 Tahun 2013 tentang Retribusi perizinan tertentu dan peraturan Bupati Flores Timur no. 4 Tahun 2014 tentang Delegasi Pendelegasian Wewenang Penandatanganan perizinan Dari Bupati Kepada kepala kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Flores Timur.

Ada beberapa program-program yang di laksanakan oleh PT. Okishin sepanjang triwulan 2016 program kerja bagi masyarakat setempat tetap berlangsung di Kabupaten Flores Timur. Lebih dari 60% desa-desa pada kabupaten ini telah memiliki lapangan pekerjaan. Sarana olah raga di kecamatan Larantuka hampir selesai dibangun, pemberian bantuan program beras miskin kepada masyarakat yang tidak mampu, dan bantuan infrastruktur dan pengadaan air bersih, program pelatihan cara penangkapan ikan kepada para nelayan di kecamatan Larantuka dan kegiatan ini akan berlanjut ke triwulan berikutnya.

Untuk pembangunan suatu daerah, khususnya daerah yang baru berkembang seperti Kabupaten Flores Timur, dibutuhkan berbagai variable, diantaranya mengenai investasi. Investasi Asing di Indonesia pada era pembangunan saat ini dunia bisnis Indonesia mendapat tempat dan peluang yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi, peningkatan bisnis di bidang property, perumahan, transportasi, komunikasi, dan lain-lain serta kehadiran berbagai investor bisnis asing akan memberikan dampak positif dalam proses mempercepat lepas landas. Hal ini penting karena investasi asing merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi dinegara-negara sedang berkembang dan sumber modal yang menjanjikan untuk mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia. Investasi asing langsung (FDI) memainkan peran yang luar biasa dan berkembang dalam bisnis global. FDI dapat memberikan suatu perusahaan pasar dan saluran pemasaran baru, fasilitas produksi yang lebih murah, akses ke teknologi baru, produk, keterampilan dan pembiayaan. Untuk Negara tuan rumah atau perusahaan asing yang menerima investasi, dapat memberikan sumber teknologi baru, modal, proses, produk, dan keterampilan manajemen, dan dengan demikian dapat memberikan dorongan yang kuat untuk pembangunan ekonomi.

Dengan adanya FDI di harapkan sangat membantu pembiayaan pembangunan juga adanya transfer teknologi, perusahaan multinasional tersebut tidak hanya menyediakan sumber-sumber finansial dan pabrik-pabrik baru saja kepada negara tuan rumah akan tetapi juga menyediakan suatu paket sumber daya yang di butuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman dan kecakapan manajerial, dan kemampuan kewiraswataan, yang kemudian dapat dialihkan kepada mitra-mitra usaha di dalam negeri melalui program pelatihan dan belajar sambil bekerja. FDI menilai bahwa pembangunan adalah bahwa perhatian multinasional secara nyata lebih tertuju kepada upaya memaksimalkan keuntungan atau tingkat hasil finansial atas setiap sen modal yang mereka keluarkan. Investasi secara langsung selalu dikaitkan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal. Dalam penanaman modal secara langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.

Sri Wahyuni

Penanaman modal asing secara langsung juga memberikan pengertian bahwa bagi pemodal asing yang ingin menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik pemodal asing hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan hadirnya atau tepatnya dengan didirikannya badan usaha tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum di daerah tersebut. Keberadaan suatu perusahaan di sekitar wilayah permukiman akan menguntungkan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan juga efek turunan lainnya. Sebaliknya bagi masyarakat, adanya sebuah perusahaan juga meningkatkan taraf kehidupan mereka terutama dari sisi ekonomi dan kesejahteraan.

B. Pengaruh PT.Okishin Flores Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Flores Timur (Larantuka)

Keberadaan PT.Okishin terlihat sekali pengaruhnya bagi masyarakat di lingkaran perusahaan dan juga di kecamatan Waibalun. Pengaruh perusahaan terlihat pada kemajuan yang signifikan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial keagamaan. Ada beberapa pengaruh yang diberikan oleh PT.Okishin yaitu sebagai berikut:

Pertama, yang paling sering disebut-sebut sebagai pengaruh positif PMA PT.Okishin Flores terhadap pembangunan di Flores Timur adalah peranannya dalam mengisi kekosongan atau kesenjangan sumber daya antara tingkat investasi yang di targetkan dengan jumlah actual tabungan domestic yang dapat di mobilisasikan. Hal yang kedua, pengaruh yang di berikan oleh PT.Okishin Flores kepada masyarakat Flores Timur adalah mampu memberikan keterampilan kerja. PT.Okishin tersebut tidak hanya menyediakan satu paket sumber daya alam yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya pengalaman dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan, serta keahlian di bidang teknologi, yang kemudian dapat di alihkan kepada mitra-mitra usaha di Kabupaten Flores Timur melalui program-program latihan dan proses belajar sambil bekerja kepada para tenaga kerjanya.

Pengaruh yang ketiga adalah PT.Okishin memberikan pendidikan bagi para manajer lokal agar mereka mengetahui cara-cara di dalam mengadakan hubungan dengan bank-bank luar negeri, mencari alternatif pasokan sumber daya, memperluas pasar, serta memiliki pemahaman yang lebih baik akan peraktek-peraktek pemasaran tingkat internasional. PT.Okishin juga memberikan pengetahuan mengenai proses produksi dengan menggunakan teknologi yang paling canggih pada saat mereka mengirim mesin-mesin dan peralatan modern ke Kabupaten Flores Timur. Dengan asumsi bahwa ketika pengetahuan tersebut akan bocor keluar jika para insinyur dan manajer berhenti bekerja dan mendirikan perusahaannya sendiri. Transfer pengetahuan, keahlian dan teknologi semacam ini di anggap sangat berguna dan produktif bagi daerah yang menerimanya.

PT.Okishin merupakan perusahaan industri perikanan, sebagai sebuah industri PT. Okishin selalu bekerja sama dengan masyarakat di daerah Larantuka, hal ini disebabkan karena partisipasi dari masyarakat merupakan kunci kesuksesan dari sebuah perusahaan. Dalam hal memberikan kesejahteraan pada masyarakat Larantuka PT.Okishin memberikan model pembelajaran cara menangkap dan mengelola ikan dengan menggunakan alat-alat teknologi, dan ilmu pengetahuan yang memadai. Kita ketahui bahwa Community Development ini adalah sebuah kegiatan pengembangan masyarakat yang di arahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai sosial ekonominya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut di harapkan menjadi lebih mandiri dan kesejahteraan yang lebih baik. Berdasarkan konsep Community Development ini dapat di lihat bahwa perusahaan PT.Okishin ini memberikan peran dan pengaruh yang baik bagi masyarakat. Dapat di lihat perubahan-perubahan yang di berikan oleh PT. Okishin sangat banyak dari menyediakan lapangan kerja, memberikan keterampilan dan lain-lain.

Pengaruh PT. OKHISIN Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Flores Timur

Adanya PT Okishin di Larantuka mempunyai pengaruh besar bagi kepentingan ekonomi, politik, dan sosial masyarakat di daerah Larantuka. Sejauh ini yang saya lihat bahwa peran PT OKISHIN cukup berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena, masyarakat yang dulunya tidak berpendidikan, tingkat pendapatan yang rendah, belum mengenal teknologi yang canggih, dengan adanya PT OKISHIN pendidikan masyarakat Larantuka sedikit demi sedikit meningkat, tingkat pendapatan semakin meningkat, dan Nelayan juga sudah mengenal mesin motor tempel dan perahu modern.

Kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakatnya. Dalam lingkup masyarakat Larantuka kegiatan perekonomiannya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya laut. Kita ketahui bahwa kebanyakan dari masyarakat yang hidup di daerah pantai mata pencahariannya sebagai nelayan menguntungkan hidupnya di sektor perikanan. Pemerintahan dan Perusahaan PT. Okishin menjanjikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya PT. Okishin Flores ini akan membawa kesejahteraan masyarakat. Janji tersebut ternyata terbukti. Karena peningkatan taraf hidup masyarakat Larantuka pun semakin meningkat.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Terbukanya akses bagi globalisasi ekonomi telah memudahkan manusia ataupun aktor-aktor hubungan internasional untuk mengadakan interaksi bidang perekonomian. Timbulnya perusahaan-perusahaan asing (MNCs) di berbagai negara khususnya negara berkembang yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, menjadi bukti nyata kuatnya arus globalisasi ekonomi dan transformasi.

Masalah ekonomi saat ini sedikit banyak ditentukan dan dikuasai oleh MNC yang menguasai modal, pasar uang, pasaran komoditi, sains dan teknologi, hak-hak paten, serta pemasaran hasil-hasil industri. MNC umumnya beroperasi produksi di negara-negara berkembang dengan pertimbangan kemudahan meraih bahan mentah, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan dapat memperoleh tenaga kerja secara murah di negara berkembang.

Kabupaten Flores Timur memiliki potensi sumber daya alam yang dapat di kelola oleh investor asing sehingga dapat membuka lapangan kerja dan peningkatan ekonomi daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. PT. Okishin mempunyai peran yang sangat penting di Flores Timur, hal ini di sebabkan, semenjak adanya PT. Okishin telah membawa pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan ekonomi dari daerah dan pendapatan devisa negara dari nilai hasil produksi, serta membuka lapangan kerja baru pada masyarakat sekitar khususnya para nelayan. Selain itu juga PT. Okishin juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Larantuka dengan memperkerjakan sebagian masyarakat di perusahaan serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat.

b. Saran

- Perlunya melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses-proses perencanaan, pemetaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi terkait pengelolaan sumber daya alam termasuk adanya informasi tentang perkembangan dan pencapaian pengelolaan tersebut.

Sri Wahyuni

- Menyusun sistem insentif bagi kegiatan investasi agar Daerah Flores Timur mampu bersaing dengan daerah lain untuk menarik investasi lain pada sektor/bidang usaha dan lokasi tertentu, termasuk insentif bagi pembangunan infrastruktur daerah.
- Meningkatkan citra daerah Kabupaten Flores Timur sebagai lokasi investasi yang aman dan menguntungkan bagi para investor asing lainnya selain investor dari Jepang, dengan peningkatan kualitas kegiatan promosi dan kerja sama investasi yang lebih terarah dan terfokus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

Dillon H.S dan Hermanto, 1993 “ Kemiskinan di Negara berkembang masalah konseptual Global “ dalam prisma no. 3thn XII

Hadiwinata, Bob S. 2002. Politik Bisnis Internasional. Yogyakarta: Kansius

Siprianus Paskalis, 2007, Dalam SkripsiInvestasi Asing PT.OKISHIN Flores Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Kabupaten Flores Timur, Universitas 45, hal 26
Jurnal

Andalas Journal of Internasional studies|Vol 4 No 1 Mei Tahun 2015 diakses pada tanggal 18 September 2017 e-journal.uajy.ac.id diakses pada tanggal 24 agustus 2017

Perundang-Undangan :

Undang-undang No.1 Tahun 1997 Tentang Penanaman Modal Asing

Laporan-Laporan :

Badan Pusat Statistik, 2000, Laporan perekonomian Kabupaten Flores Timur,BPS, Kabupaten Flores Timur

Kelautan dan Perikanan 2013 Daerah Kabupaten Flores Timur

Internet :

http://www.academia.edu/31259526/Community_Development di akses 7 september

Http://www.go.id/floretimur/index2php?option=com_content&do_pdf=1&id=222 diakses 22
diakses 10 januari 2016

http://www.florestimurkab.go.id/florestimur/index2.php?option=content&do_pdf=1&id=222diakses 03 januari 2017 pk 21:00

Http://en.wikipedia.org/wiki/foreign_direct_investment, diakses pada tanggal 18 september 2017

http://www.academia.edu/31259526/Community_Development di akses 7 september
<ld.beritasatu.com/home/mewujudkan-community-development/156478>

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KESUKSESAN KOREAN WAVE KHUSUSNYA K-POP SEJAK TAHUN 2010

Fadlun Arrayyan Bonde
Arief Wicaksono, S.Ip.,MA
Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA

ABSTRAK

Korean Wave merupakan sebuah fenomena budaya dari Korea Selatan yang mampu menembus pasar internasional dan menjadi fokus penelitian oleh banyak studi ilmu pengetahuan salah satunya studi ilmu Hubungan Internasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitik dimana peneliti menggambarkan faktor-faktor pendukung kesuksesan Korean Wave dengan batasan penelitian yang fokus pada Korean Music Pop (K-Pop) sejak tahun 2010. Data yang di gunakan yaitu Data Sekunder yang di kumpulkan melalui Library Research. Untuk menganalisa data, teknik yang di gunakan yaitu analisa data Kualitatif. Korean Music Pop (K-Pop) adalah salah satu contoh Korean Wave yang di terima oleh dunia internasional karena adanya ciri khas yang hanya dimiliki oleh K-Pop itu sendiri. Kesuksesan yang di raih tentu karena adanya faktor-faktor pendukung seperti Pemerintah Korea Selatan sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan terkait K-Pop diantaranya kebijakan For A Global Korea dan Learning From Hollywood. Selain pemerintah, sistem music entertainment melalui agency yang diberlakukan Korea Selatan untuk menciptakan Idol-idol pilihan merupakan salah satu faktor pendukung lainnya karena dengan Idol yang memiliki standar maka K-Pop bisa di terima dunia internasional. Selanjutnya dukungan masyarakat merupakan hal penting untuk tetap mempertahankan Korean Wave dan K-Pop..

Kata Kunci: Korean Wave, K-Pop, Pemerintah Korea Selatan, Music Entertainment

PENDAHULUAN

Korea Selatan saat ini dikenal dengan fenomena budaya yang disebut Hallyu atau Korean Wave. Korean Wave adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan fenomena penyebaran budaya Korea Selatan ke dunia internasional. Istilah Korean Wave atau Hallyu pertama kali di publikasikan oleh seorang penulis dari China yang pada saat itu menuliskan tentang bagaimana budaya Korea Selatan meraih kesuksesan di negeri tirai bambu tersebut.⁶

Pada awalnya negara tersebut hanya bergantung pada ekspor dari industri makanan dan manufaktur, yang pada kenyataannya tidak terlalu berhasil. Pemerintah Korea Selatan kemudian mencoba untuk mengeksport produk budaya bersamaan dengan produk manufaktur dan makanan, kemudian produk kebudayaan Korea Selatan ditempatkan bersama produk-produk kebudayaan dari negara lain di Pasar Asia. Pada saat itu Pasar Asia masih didominasi oleh produk kebudayaan dari Amerika Serikat, Jepang dan Cina.⁷ Seiring dengan berjalannya waktu, produk kebudayaan Korea Selatan semakin banyak digemari. Melihat respon yang baik dari masyarakat luar, pemerintah Korea Selatan lebih menekankan ekspor dari produk-produk kebudayaan. Hasilnya produk kebudayaan Korea Selatan semakin banyak digemari, khususnya dari industri film dan musik. Selain film dan drama yang menarik perhatian dunia internasional, musik Pop Korea Selatan juga memiliki tempat sendiri untuk ekspansi budaya Korea Selatan.

⁶Suray Agung Nugroho, "Pengaruh Hallyu di Indonesia"

https://www.academia.edu/2097286/Hallyu_Hallyu_Hallyu.....dan_Indonesia_dan....dunia....dan. PDF. Di unduh pada 17 Juli 2017, 04.27 WITA

⁷Hardianti "Korean wave dan peningkatan perekonomian Korea Selatan"

<https://www.seniberpikir.com/korean-wave-dan-peningkatan-perekonomian-korea-selatan/>. Di akses pada 27 Juli 2017, 13.40 WITA

Fadlun Arrayyan Bonde

K-Pop atau Musik Pop Korea Selatan memang mengalami sedikit keterlambatan dibanding dengan film dan drama karena hingga akhir 1999-an televisi hanya berperan sebagai fasilitator untuk produksi musik karena tidak ada perusahaan musik yang independen tetapi sejak 2000-an, industri musik bergerak menjadi independen dan para penyanyi Pop terus menerus tampil di TV. Untuk pasar domestik, musik Pop menjadi sangat populer sampai akhirnya tahun 2003 artis-artis Korea berhasil menembus pasar internasional.

Setelah sukses dengan film dan drama, musik Korea Selatan juga berkembang dengan pesat, hal ini terbukti ketika menduniannya fenomena goyangan “Invisible Horse” milik PSY. Park Jae Sang atau lebih dikenal sebagai PSY sukses dengan Oppa Gangnam Style nya yang menembus tangga musik Amerika dan Eropa ini merupakan sebuah keberhasilan bagi Korea Selatan mengingat sulitnya menembus pasar negara-negara Barat yang pada dasarnya tidak tertarik dengan musik atau penyanyi selain dari negara nya sendiri. Seiring perkembangannya, Korea Selatan pun semakin di kenal dengan adanya Korean Wave. Pada masa kepemimpinan Presiden Lee Myung Bak (2008-2013) Korea Selatan mengalami peningkatan ekonomi dengan pendapatan per kapita per tahun lebih dari USD20 ribu dan memiliki cadangan devisa senilai USD525,4 milyar, Korea Selatan telah menempatkan posisi sebagai ekonomi ke-11 terbesar dunia.

Selain hanya sebagai sarana mempromosikan kebudayaan, Korean Wave juga di gunakan sebagai cara untuk mempromosikan brand dari Korea Selatan. Presiden Lee menaikkan target brand Korea Selatan dari peringkat ke- 33 pada tahun 2008 menjadi peringkat 15 pada tahun 2013. Naiknya peringkat brand Korea Selatan terbukti pada tahun 2013, Korea Selatan masuk ke dalam 20 daftar negara terbaik dalam perdagangan dan arus bisnis.

Sekarang ini ditengah booming nya Korean Wave melalui K-Pop, Korea Selatan selaku tuan tanah tentu mendapatkan hasil dari ekspansinya, namun sebuah keberhasilan pasti melewati proses yang tidak sementara dan ada aktor yang terlibat atau faktor-faktor pendukung dibalik kesuksesannya, baik itu berupa dukungan dari pemerintah Korea Selatan itu sendiri atau adanya pihak-pihak lain yang ikut membantu sejak 2010 hingga sekarang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitik dimana peneliti menggambarkan faktor-faktor pendukung kesuksesan Korean Wave dengan batasan penelitian yang fokus pada Korean Music Pop (K-Pop) sejak tahun 2010. Data yang di gunakan adalah Data Sekunder yaitu data yang berasal dari pengumpulan data melalui penelusuran dari berbagai sumber literatur yaitu jurnal, buku, dan olahan hasil penelitian terdahulu yang di kumpulkan melalui Library Research yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah data yang terkait dengan isu Korean Wave khususnya K-Pop. Untuk menganalisa data, teknik yang di gunakan yaitu analisa data Kualitatif yaitu analisa data yang di tekankan pada data-data non-matematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai strategi serta dinamika ekonomi dan politik di kawasan Asia Timur, terdapat banyak negara yang dalam perkembangannya mengalami kemajuan cukup pesat dan signifikan pada kedua sektor tersebut. Di antara negara-negara itu, salah satunya yang termasuk paling menonjol adalah Korea Selatan. Sejak 2009 Hallyu tidak lagi muncul sebagai fenomena budaya di kawasan Asia, tetapi hingga Eropa, Australia, Afrika Barat hingga Amerika. Luasnya penyebaran Hallyu di pengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, karena jika di teliti kembali hingga akhir 1990-an industri budaya Korea Selatan dan masih sangat baru dan pada saat itu industri kebudayaan masih sangat di dominasi oleh industri budaya Jepang. Adapun faktor pendukung yaitu adanya keterlibatan aktor-aktor yang bertanggung jawab, seperti :

Faktor-Faktor Pendukung Kesuksesan Korean Wave Khususnya K-Pop Sejak Tahun 2010

Adanya Dukungan dari pemerintah Korea Selatan, hal ini bisa di lihat dari beerapa kebijakan pemerintah Korea Selatan yang mendukung perkembangan Korean Wave lebih spesifiknya musik pop asal Korea atau K-Pop.⁸ Sejak tahun 2008 Presiden Lee Myung Bak sebagai presiden baru Korea Selatan juga menganggap bahwa Korean Wave sebagai suatu sarana bagi Korea Selatan untuk tetap menadapatkan perhatian dunia internasional dan sebagai upaya untuk pemerintah agar bisa mempertahankan perekonomian guna kesejahteraan bersama yang sebelumnya telah stabil akibat kontribusi Korean Wave untuk Korea Selatan itu sendiri. Pemerintahan Presiden Lee Myung Bak (2008-2013) membuat kebijakan luar negeri For A Global Korea untuk memperkenalkan brand baru Korea sebagai langkah awal untuk menambah citra positif Korea Selatan dimata internasional.Pada tahun 2009, Presiden Lee mulai mempublikasikan kampanye nation branding dengan mendirikan The Presidential Council on Nation Branding (PCNB).Langkah ini merupakan bentuk keprihatinan pemerintah terhadap kesenjangan antara kesuksesan pembangunan ekonomi Korea dan citra Korea Selatan di tingkat internasional.

Kebijakan For A Global Korea di dokumentasikan kedalam Diplomatic White Paper yang di terbitkan pada tahun 2008. Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Korea menjelaskan bahwa pemerintah memperkenalkan budaya Korea Selatan ke negara-negara luar untuk mendorong diplomasi publik melalui penawaran stasiun televisi negara-negara asing dan video dokumentasi yang menggambarkan Korea dan kebudayaan Korea.For A Global Korea di cetuskan pada tahun 2008 kemudian pada tahun 2009 For A Global Korea mulai di wujudkan melalui usaha pemerintah Korea Selatan dalam mempromosikan National Branding. Tahun 2010 National Branding pun di aplikasikan secara besar-besaran. Dalam fenomena K-Pop misalnya, hal itu bisa di lihat ketika PSY dalam video klip Oppa Gangnam Style nya memperlihatkan produk-produk Korea Selatan melalui fashion yang di gunakannya. Seperti yang di lansir pa da Kompasiana bahwa PSY menggunakan produk dalam negeri dengan skinny jeans style yang di ketahui di rancang oleh istrinya sendiri. PSY berhasil menginvasi dunia fashion.Setelan jas ala PSY jadi inspirasi kostum Halloween favorit bahkan Katy Perry pun sempat meniru gaya jas PSY saat pemilu Amerika.

Dalam prakteknya, For A Global Korea memberikan dampak bagi Korea Selatan dan Korean Wave itu sendiri. Korea Selatan dengan di promosikan nya budaya Korea Selatan secara tidak langsung mendapatkan keuntungan seperti meningkatnya perekonomian Korea Selatan yang menempatkan Korea Selatan di posisi ke-12 sebagai GDP tertinggi di tahun 2009. Untuk Korean Wave sendiri, dengan adanya For A Global Koreamemberikan ruang gerak yang lebih kepada Korean Wave. Di industri musik misalnya, para pelakon dunia music entertainment bisa dengan lebih mudah menjajakan karyanya kepada dunia.ketersediaan ruang terbuka melalui media tentu menjadi sarana untuk mempromosikan music dari Korea Selatan.

Untuk lebih meningkatkan daya tarik industry hiburan. Korea Selatan memberikan dorongan untuk menyesuaikan dengan sistem media Amerika Serikat yang di kenal sebagai Learning from Hollywood. Tujuan dari pengadopsian sistem tersebut adalah melakukan promosi perusahaan-perusahaan penyiaran Korea Selatan seperti, Munhwa Broadcasting Company (MBC), Seoul Broadcasting System (SBS) dan Korean Broadcasting System (KBS) secara besaran-besaran di media penyiaran.Melalui media inilah Korean Wave ikut menyebar ke hampir seluruh dunia.

Contoh upaya tersebut dapat dilihat melalui pembentukan pusat-pusat kebudayaan Korea di luar negeri sebagai sarana diplomasi publik untuk mempromosikan Korean Wave serta dukungan finansial bagi industri budaya populer seperti memberi subsidi pada industri musik sebesar 40 miliar serta investasi sebesar 2 triliun Won pada tahun 2008 untuk membentuk "Korean Wave Hollywood" sebagai upaya untuk membentuk Budaya Asia Timur yang dapat disandingkan dengan Hollywood di Amerika Serikat.

⁸ Isharyanto, "Pertumbuhan industry hiburan Korea Selatan"
<https://isharyanto.wordpress.com/derap-ekonomi-publik>. Di akses pada 01 Januari 2017, 22.40 WITA
"Gangnam Style dan mau di bawa kemana Halyyu atau Korean Wave nantinya

Fadlun Arrayyan Bonde

Kebijakan tentang Learning from Hollywood yang di galakkan pemerintah Korea Selatan salah satu perwujudannya adalah dengan melakukan pertukaran informasi dengan media asing seperti CNN milik Amerika Serikat dan MBC dari Korea Selatan yang melakukan kerjasama yang pada hasilnya produk-produk Korea Selatan bisa di promosikan melalui TV kabel dari AS tersebut.

Faktor lainnya yang mendukung kesuksesan K-Pop yaitu K-Pop Entertainment itu sendiri. Korea Selatan dalam menjalankan sistem entertainment khususnya di bidang musik secara maksimal, yaitu di berlakukannya sistem agensi (Agency System) dimana pemerintah memberikan ruang kepada beberapa orang dengan modal yang besar untuk mengelolah sebuah agensi. Sejauh ini ada beberapa agensi yang terkenal karena keberhasilannya menciptakan Idol-idol besar seperti girl group SNSD dan boy group EXO dari agensi SM Entertainment, JYP Entertainment yang sukses dengan girl group Miss A dan YG Entertainment dengan boy group legendaries yaitu Big Bng dan girl group yang belum ini debut namun berhasil menjadi pendaatang baru yang sangat di gilai hampir seluruh dunia yaitu Black Pink.⁹

Tugas agensi ini adalah memberikan kesempatan dan ruang bagi para generasi K-Pop di Korea Selatan untuk bisa berekspresi melalui hal yang mereka sukai yaitu musik dan juga sebagai jembatan untuk menjadi seorang Idol, menyediakan tempat tinggal dan tempat latihan untuk para Idol, tempat untuk mengasah bakat, hingga menejerial. Sebuah agensi bertanggung jawab penuh terhadap Idol-idol yang masih terikat kontrak. Setiap agensi punya cara masing untuk tiap Idol mereka.¹⁰

Populernya budaya dan strategi entertainment Korea Selatan tidak lepas dari proses yang panjang. Tidak hanya mengandalkan keindahan fisik, usaha tetapi kerja keras sangat dibutuhkan. Artist-artis Korea umumnya melewati waktu yang panjang sebelum benar-benar terjun ke dunia entertainment. Seorang Idolakan melalui tahap training yang bisa memakan waktu hingga 6 tahun dan baru bisa debut apabila sudah mencapai target sebuah agensi. Kemudian, salah satu cara agar para idol menjadi sorotan adalah dengan menjadi juara di tangga lagu. Kesuksesan para idola K-Pop di industri K-Pop salah satunya ditentukan oleh keberhasilan mereka meraih trophy juara pertama di setiap program musik tempat di mana mereka melakukan promosi.

Hubungan antar pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu faktor kesuksesan Korean Wave. Melalui media massa pemerintah berusaha menonjolkan isu, citra dan karakteristik dari suatu hal, dalam hal ini budaya pop Korea Selatan. Kemudian masyarakat memberi respon berupa penerimaan, seperti saat pemerintah Korea Selatan mempromosikan produk-produk dalam negeri "cintailah produk dalam negeri", masyarakat dengan antusias mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, baik itu berupa produk elektronik, tekstil, kosmetik ataupun makanan.

Korea Selatan memproduksi produk budaya yang diminati dan digemari oleh masyarakat luas karena keunikan unsur domestik khas Korea dengan teknologi dan modernitas ala Barat. Dengan upaya ini Korea Selatan berhasil menjembatani budaya Barat dan Timur dan menghasilkan suatu produk yang bisa diterima oleh keduanya.

Suksesnya musik khas Korea Selatan oleh para Idol merupakan sebuah pencapaian yang besar. Hal ini tidak luput dari peran masyarakat Korea Sendiri. Dalam mendukung musik dalam negerinya, masyarakat Korea Selatan khususnya para kaum muda yang sangat antusias mendukung Idol nya. Mereka tergabung dalam sebuah Fans Club. Sebagai seorang penggemar, mereka tidak malu dalam memberi dukungan baik berupa dukungan opini maupun materi.¹¹

⁹ Mareta Chairani Kauraw, "Strategi Korea Selatan dalam Ekspor Korean Waves ke Jepang" eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 3, 2013 : 605-614 halaman 606

¹⁰ [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/hi_mareta_korean_waves_japan%20\(08-30-13-07-25-40\).PDF](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/hi_mareta_korean_waves_japan%20(08-30-13-07-25-40).PDF). Di unduh pada 09 Februari 2017, 13.03 WITA

¹¹ Citra Triayu "Korean Wave Sebagai Diplomasi Kebudayaan Korea Selatan" <http://scholar.unand.ac.id/17868/2/BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.PDF>. Di unduh pada 10 Agustus 2017, 01.00 WITA

Faktor-Faktor Pendukung Kesuksesan Korean Wave Khususnya K-Pop Sejak Tahun 2010

Bentuk dukungan masyarakat Korea Selatan khususnya yang tergabung dalam Fans Club terhadap K-Pop, di antaranya yaitu

Mengirimkan Truk Makanan

Truk makanan dan kopi memang sering terlihat di acara jumpa fans atau di lokasi syuting drama. Beberapa truk makanan itu rupanya kiriman para penggemar yang ingin memberikan dukungan untuk idola mereka. Tak hanya idola mereka saja yang boleh menikmati menu yang ada di truk makanan atau truk kopi, tapi juga para kru yang tergabung dalam proyek sang idola. Mereka biasanya menyediakan minuman dingin dan juga cemilan-cemilan untuk menambah energi para kru dan idol.¹²

Belajar Siang Malam Demi Ketemu Idola

Untuk para penggemar yang masih sekolah, biasanya akan rajin-rajin belajar siang dan malam agar diizinkan orang tua pergi ke konser idola. Cara ini cukup baik untuk memberikan motivasi pada para penggemar, terutama yang masih remaja. Beberapa penggemar bahkan memposting nilai 100 mereka sebagai usaha untuk menghadiri konser idola favoritnya.¹³

Pergi Keluar Negeri Temui Idola

Kalau cara yang satu ini pasti dilakukan oleh penggemar yang tinggal di luar Korea. Demi sang idola, mereka akan menyisihkan sebagian uang. Mereka harus rela menabung agar bisa membeli tiket bertemu idola. Tidak cuma pergi ke Korea, kadang jika idola mereka sedang mengadakan konser di negara tetangga, mereka tetap rela terbang menyeberangi laut demi bisa menyapa langsung sang idola.

Antri tiket berjam-jam

Penggemar berat idol grup K-Pop pasti sudah nggak asing dengan kegiatan yang satu ini. Mereka rela berdesak-desakan dalam antrian yang panjang. Cuaca yang dingin atau panas pun tak akan menghentikan mereka demi ketemu dengan idola yang selama ini hanya dilihat dari layar kaca. Bahkan mereka rela berkemah di tempat penjualan tiket.

Hadiah mewah (Jogong)

Tidak berhenti hanya membeli album atau tiket konser saja, fans-fans grup K-Pop di Korea Selatan sana biasa memberikan 'jogong' tiap idolanya ulang tahun, meluncurkan album baru, atau hanya sekedar jadi tamu di acara radio. Sederhananya, 'jogong' artinya tribute atau hadiah. Meski sudah termasuk lumrah kalau seorang penggemar memberikan kado ke artis idolanya, hadiah fans K-Pop ini ada di level yang berbeda. Bukan masalah jumlah hadiah saja yang melimpah, tapi isinya ternyata semua barang mewah. Biasanya diberikan atas nama fanbase atau kumpulan penggemar, bukan perseorangan.¹⁴

Dukungan-dukungan seperti itu memberikan motivasi kepada para idol untuk tetap berkarya. Dengan begitu, para idol bertanggung jawab untuk tetap bisa memberikan yang terbaik untuk para penggemarnya, dengan kata lain, lebih meningkatkan kualitas musik Pop Korea Selatan.

¹² Adina Dwirezanti "Budaya Populer Sebagai Alat Diplomasi Publik : Analisa Peran Korean Wave dalam Diplomasi Publik Korea Periode 2005-2010", P.32, lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285083-S-Adina%20Dwirezanti.pdf. Di unduh pada 04 September, 02.00 WITA
<http://m.dreamers.id/lifestyle/article/4292>

¹³ Sarah Phalosa Rani, "Korean Wave sebagai salah satu pendukung Nation Branding yang di lakukan oleh Korea Selatan", <http://lib.ui.ac.id/file%3Ffile%23Digital/2016-12/20434595-MK-Sarah-Phalosa-Rani.pdf>. Di unduh pada 04 September 2017, 03.00 WITA

¹⁴ Sarah Phalosa Rani, "Korean Wave sebagai salah satu pendukung Nation Branding yang di lakukan oleh Korea Selatan", <http://lib.ui.ac.id/file%3Ffile%23Digital/2016-12/20434595-MK-Sarah-Phalosa-Rani.pdf>. Di unduh pada 04 September 2017, 03.00 WITA

PENUTUP

Kesimpulan

Kesuksesan Musik Pop Korea Selatan dalam ekspansi budaya melalui Korean Wave tentu di pengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang di maksud di antaraya yaitu keterlibatan pemerintah Korea Selatan yang melalui kebijakan-kebijakannya terkait Korean Wave dan K-Pop, di antaranya yaitu melalui :

For A global Korea yaitu berupa promosi Nation Branding, musik Pop Korea Selatan adalah salah satunya. Learning From Hollywood untuk meningkatkan kualitas musik Korea Selatan. Selain dukungan pemerintah, keterlibatan aktor lain yang tergabung dalam Music Entertainment dengan sistem agensi nya juga ikut berkontribusi dalam proses kesuksesan musik Korea. Karena dengan adanya sistem agensi ini, musik dan Idol yang di ciptakan adalah mereka yang memiliki standar sehingga mampu bersaing di dunia internasional.

Tidak dapat di pungkiri bahwa K-Pop dan dukungan masyarakat Korea Selatan itu sendiri adalah faktor penentu dari kesuksesan para Idol dalam berkarya dalam musik. Dukungan tersebut bisa dilihat dari antusiasnya masyarakat Korea dengan musik dari negaranya sehingga masyarakat yang tergabung menjadi Fansclub para Idol tidak segan-segan memberi dukungan tidak hanya berupa dukungan moril tetapi juga materil seperti jogong.

Saran

Penelitian ini menggambarkan bagaimana sebuah fenomena K-pop melalui Korean Wave bisa sangat booming. Dengan mengemukakan faktor-faktor pendukung kesuksesan dari Korean Wave sejak tahun 2010, besar harapan, agar penelitian ini mampu berkontribusi dalam perkembangan isu-isu Hubungan Internasional pada umumnya dan Korean Wave dan K-pop pada khususnya. Peneliti sadar bahwa banyak kekurangan dalam penelitian ini contohnya peneliti tidak menuliskan fakta lain dari kebijakan-kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemimpin Korea Selatan dari tahun 2010 hingga 2017, yaitu semasa jabatan Presiden Lee Myung Bak (2008-2013) dan Park Geun Hye (2013-2017) sehingga apabila ada yang tertarik dengan isu yang sama maka mampu menggambarkan lebih dalam tentang apa penyebab utama sehingga Korean Musik Pop bisa mendunia dan bersaing dengan musik Pop Barat yang telah lama eksis dan juga menemukan fakta-fakta baru terkait Korean Music Pop.

DAFTAR PUSTAKA

Suray Agung Nugroho, "Pengaruh Hallyu di Indonesia" https://www.academia.edu/2097286/Hallyu_Hallyu_Hallyu....._dan_Indonesia_dan....dunia....dan.PDF.

Hardianti "Korean wave dan peningkatan perekonomian Korea Selatan" <https://www.seniberpikir.com/korean-wave-dan-peningkatan-perekonomian-korea-selatan/>.

Isharyanto, "Pertumbuhan industry hiburan Korea Selatan" <https://isharyanto.wordpress.com/derap-ekonomi-publik>.

"Gangnam Style dan mau di bawa kemana Hallyu atau Korean Wave nantinya" <https://mudabentara.wordpress.com/2013/03/11>.

Mareta Chairani Kaurow, "Strategi Korea Selatan dalam Ekspor Korean Waves ke Jepang" eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 3, 2013 : 605-614 halaman 606

[http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/hi_mareta_korean_waves_japan%20\(08-30-13-07-25-40\).PDF](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/hi_mareta_korean_waves_japan%20(08-30-13-07-25-40).PDF). Di unduh pada 09 Februari 2017, 13.03 WITA

Citra Triayu "Korean Wave Sebagai Diplomasi Kebudayaan Korea Selatan" <http://scholar.unand.ac.id/17868/2/BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.PDF>.

Vinandhika, "Strategi dan Dinamika Ekonomi Politik Internal dari Korea Selatan" http://vinandhika-p--fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-47697-MBP%20Asia%20Timur-.htmlv. <http://scholar.unand.ac.id/17868/2/BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf>.

Adina Dwirezanti "Budaya Populer Sebagai Alat Diplomasi Publik : Analisa Peran Korean Wave dalam Diplomasi Publik Korea Periode 2005-2010", P.32, lib.ui.ac.id/file?=&digital/20285083-SAdina%20Dwirezanti.pdf. <http://m.dreamers.id/lifestyle/article/4292>

Sarah Phalosa Rani, "Korean Wave sebagai salah satu pendukung Nation Branding yang di lakukan oleh Korea Selatan", <http://lib.ui.ac.id/file%3Ffile%#Digital/2016-12/20434595-MK-Sarah-Phalosa-Rani.pdf>.

Liu, X. (2007), The Rising Korean wave among Chinese Youth, CSP 104 Academic Writing Skills, Chua Chongjin, hlm. 4

CNN.com http://www.kompasiana.com/y0h44n44/globalisasi-demam-korea_57dd2ec86d7e6192473d5a96.

<http://www.grid.id/K-Pop/K-News/Inilah-5-Cara-Fans-Tunjukkan-Rasa-Sayangnya-Buat-Idola>. Di akses pada 06 September 2017, 02.22 WITA

<http://www.hipwee.com/feature/fans-k-pop>. Di akses pada 06 September 2017, 03.00 WITA

GERAKAN ISLAM NUSANTARA DALAM MENCEGAH AKSI TERORISME DI INDONESIA

Herwin
Arief Wicaksono, S.Ip.,MA
Rosnani, S.Ip.,MA

ABSTRACT

Regarding of hugethreats from islamic radicalorganisations generally in the world and particularly indonesia,this journal intents to describe hard and soft approaches from governmentin cooperatewithIslamic moderat civil organisations to defence their unity in diversity.Specifically nahdlatul Ulama as the biggest islamic organisation with their old concept new term namely Islam Nusantara through in-depth interview with stakeholders,first of allit will describe respons international entities toward NU and Islam Nusantara , second of all is effort from NU and others islam organisation movement to prevent a spreading terrorism and terror act, the end is how goverment collaborate with NU operate counterinsurgency and counterterrorism concepts to counter radicalisation

Keywords : counterinsurgency, counterterrorism, Islam Nusantara

PENDAHULUAN

Perubahanan pola politik di dunia berubah secara drastic setelah 9/11, dimana sebelumnya, tatananduniadikuasaioleh Amerika Serikat,namunapa yang ditunjukkan oleh Al-Qaeda yang mewakili non state actor membuat pola hubungan antar negara dan antar aktor semakin kompleks, artinya negara bukan lagi aktor an sich dalam pola politik global, pandangan akan kemanan dalam hal ini (terorisme) pun bukan lagi bersifat outward looking tapi inward looking, aspek keamanan setelah kejadian 9/11 lebih ditinjau lebih ke dalam negeri, Karna aksi terorisme dilatarbelakangi banyak hal, untuk itu negara harus siap menjamin hak-hak dasar warganegaranya, termasuk keamanan untuk menghindari aksi teror yang bisa muncul dari akar rumput dikarenakan ada hak mereka yang tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Jaringan internasional Al-Qaeda yang mewakili aktor non-state pun mempunyai pengaruh besar ke seluruh dunia, paham dan gerakan yang disebarkan Al-Qaeda tak dipungkiri mendapatkan tempat disebagian warga negara yang memiliki paham yang sama, bagi mereka yang memilik kemampuan materi, mereka akan bergabung bersama Al-Qaeda di wilayah timur tengah, dan bagi mereka yang memiliki semangat yang sama namun terkendala materi akan membuat jaringan baru yang sepaham dengan Al-Qaeda, paham fundamentalis atau paham yang dibawa Al-Qaeda ini juga berpengaruh di Indonesia, indonesia dinilai sangat mudah dipengaruhi karna mayoritas penduduknya warga Muslim yang tentunyamemilikisemangat jihad yang menggebuhebu.Menurutfahmiali yang dikutip oleh koran kompas bahwa Invasi gelombang paham radikal atau fundamentalisme ini di indonesia terbagi atas 2 metode yaitu melalui pemikiran dan gerakan, Secara pemikiran, Seperti halnya pemimpin Al-Qaeda yang berasal dari Arab Saudi, pemikiran radikal pun muncul di Arab Saudi melalui paham Wahabi, paham Wahabi sendiri mengkampanyekan pemurnian ajaran dengan merujuk langsung Qur'an dan Sunnah dengan model pemahaman yang literal.¹⁵

¹⁵ Abdurrahman Wahid. "Ilusi Negara Islam". Jakarta: The Wahid Institute 2009 hal 78

KERANGKA DASAR TEORI

1. Teori Counterinsurgency

Counterinsurgency menurut David Galula (1964:4) adalah perlawanan terhadap perjuangan yang berlarut-larut oleh pemberontak atau teroris yang menggunakan berbagai macam metode secara perlahan berlanjut untuk mendapatkan kekuasaan dan menggulingkan pemerintahan yang ada, counterinsurgent mempunyai pertanggungjawaban yang sangat besar yaitu menegakkan hukum yang ada diseluruh wilayahnya serta bagaimana mencegah aset pemerintah dan masyarakat tidak dihancurkan oleh insurgent atau teroris, dalam hal mendapatkan kekuasaan pemerintah atau pihak counterinsurgent harus memastikan bahwa masyarakat masih patuh terhadap pemerintah dan memutuskan komunikasi antara masyarakat dan teroris atau insurgent.

a. Peran preventif pemerintah mencegah hadirnya teroris atau insurgent

Peran pemerintah secara langsung yaitu mencegah hadirnya insurgent dengan membuat paying hukum guna mencegah hadirnya teroris, menagkap pimpinan organisasi tersebut, memutuskan komunikasi organisasi insurgent terhadap masyarakat, melarang organisasi organisasi tersebut atau jika negara tersebut menganut sistem demokrasi, pemerintah membawa mereka ke pengadilan dengan bukti kuat atas keinginan masyarakat, melakukan pengamanan jika ada ancaman terhadap masyarakat, sedangkan peran pemerintah secara tidak langsung yaitu menguatkan birokrasi, menguatkan polisi dan militer yang bisa menjadi reputasi nyata dari pihak counterinsurgent dan meredam potensi percobaan insurgency, mengaplikasikan sistem hukum yang berlaku, pemimpin yang berani, waspada akan ancaman, serta memanfaatkan intelijen guna mencegah organisasi sedari dini, hal – hal tersebut merupakan kunci untuk meraih kemenangan atas insurgent.

b. Peran represif pemerintah pada saat peperangan melawan insurgent atau teroris

Secara classic, hal terpenting bukanlah mensterilkan area perang dari kehadiran insurgent, tapi bagaimana pihak counterinsurgent memutihkan area dan bias beroperasi di lain tempat, hanya dengan dukungan dari masyarakat mayoritas maupun minoritas, hal tersebut bias terjadi, relative mudah bagi counterinsurgent untuk “membubarkan” insurgent dengan hanya penggunaan angkatan bersenjata, tapi membubarkan organisasi politik mereka dan mencegah datangnya kembali pihak insurgent untuk membangun kembali selis politik sangatlah mustahil kecuali dengan kerjasama dengan masyarakat, untuk itu, masyarakat sebagai pihak objektif harus di penuhi kebutuhannya oleh pihak counterinsurgent atau pemerintah, harus diambil dukungannya walaupun secara diam diam, patuh akan hukum yang berlaku merupakan perjanjian tak tertulis, karna besar kecilnya perlawanan insurgent terhadap counterinsurgent diukur dengan kemampuan insurgent memperdayakan organisasinya diakar rumput atau di tingkat masyarakat.¹⁶

Secara modern menurut David Kilcullen Pihak yang mungkin menang dalam pertarungan ialah pihak yang bekerja keras dan berhasil mendapatkan dukungan global, regional dan masyarakat lokal, dan mencegah salah satu pihak melakukan hal yang sama, pengaruh negara negara tetangga menjadi area penting bagi kedua belah pihak, karna penyelundupan senjata dan material di daerah yang tidak terurus, oleh etnis minoritas, pengungsi serta media negara tetangga sangatlah riskan terjadi, pihak counterinsurgency atau pemerintah harus bekerja secara global untuk melawan propaganda dan memutuskan pendanaan dan perekrutan insurgent, hal ini menyiratkan, sangat dibutuhkananya peran vital stakeholder di perbatasan yang tentunya bergantung dari diplomasi pusat dengan Negara tetangga, dan dibutuhkan penghubung intelijen global yang mencakup area terpencil.

¹⁶David Galula. “Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice”, New York .London, Praeger Publisher, 1964, hal. 4-39

Dan hal hal lain yang terpenting juga yaitu Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam melawan insurgent dalam mengisi ruang yang tak dapat dicakup oleh pemerintah, menguasai media pemberitaan untuk membentuk persepsi masyarakat, serta bagaimana mengontrol agar benih benih insurgency tidak muncul lagi dari tingkat local hingga global.¹⁷

2. Teori Counterterrorism

a. Deradikalisasi dan Disengagement

deradikalisasi dan disengagement adalah proses interaksi psikologis dan sosial terhadap tersangka teroris untuk berkomitmen dan terlibat untuk mengurangi paham ekstrim mereka, sedangkan disengagement adalah perubahan sikap atau perilaku, melepaskan paham teror dari tersangka tersebut untuk dikembalikan kepada masyarakat, dengan menyediakan mereka dukungan ekonomi, pendidikan dan lain lain, serta menggali alasan mengapa mereka menjadi radikal, dan mencahut kepercayaan ekstrim mereka.¹⁸

Di arab saudi proses deradikalisasi melibatkan istri untuk mempengaruhi paham ekstrim suaminya, menyediakan amnesty atau ampunan serta perlindungan dari bahaya atau ancaman organisasi ekstrim mereka, dan hal tersebut terjadi bagi partisipan yang sukses di-deradikalisasi, di singapura keterlibatan komunitas anti terror sangat penting, dalam rangka deradikalisasi dan rehabilitasi yang tujuannya untuk mencegah terorisme, pemerintah singapura bergantung kepada komunitas muslim dan polisi untuk memastikan interpretasi dan ajaran yang betul dalam agama, ISD, Pergasdan RRG (religious rehabilitation group) adalah beberapa komunitas yang aktif dalam proses deradikalisasi ke masyarakat umum serta tersangka, mereka sering mengadakan konferensi ulama se-singapura, membuka forum publik di beberapa mesjid dan di tempat umum, serta menyediakan website yang memiliki teks moderat agar membantu pemerintah pada proses deradikalisasi, ACG atau Aftercare Services Group adalah kepala dari beberapa komunitas yang ada di singapura, adapun anggotanya adalah Taman Bacaan (the Singapore Malay youth organization), Yayasan Mendaki (a Muslim educational foundation), the Association of Muslim Professionals (AMP) dan lain lain, yang mana mereka adalah komunitas eksternal pemerintah dan bekerjasama dengan beberapa institusi pemerintahan seperti the Islamic Religious Council of Singapore, the Community Development Council, the National Council of State Services, komunitas media the Singapore Malay Journalist Association, the Family Service Center, mereka semua bekerjasama dalam menyediakan konseling, bantuan dana, tempat pelatihan dan kerja, uang kuliah kepada anak anak tahanan ekstrimis, menyediakan lapangan pekerjaan agar tahanan nantinya bisa menyatu kembali ke masyarakat setelah program deradikalisasi dan disengagement berhasil dilaksanakan.¹⁹

Sedangkan di indonesia, pemeriksaan di damping oleh mantan ekstrimis yang berhasil di deradikalisasi serta psikiater adalah team yang langsung berhadapan dengan tahanan, menurut Ansyad Mbai, ketika mereka ditangkap, sangat sedikit ekstrimis yang ingin bicara dengan team pemeriksa, mereka hanya bicara dengan orang yang mereka percayai, menurut mereka, semua yang berhubungan dengan pemerintah adalah musuh, untuk itu ada semacam dialog teologi dengan individu yang di utus oleh team pemeriksa yang layak untuk menginterogasi tahanan teroris, termasuk mengutus mantan militan yang berhasil di rehab, ada pula pembicaraan bukan tentang jihad dan hijrah tapi dengan topic kekeluargaan, bahwa mereka punya keluarga, orang tua dan istri yang perlu diperhatikan, adapun dua mantan tahanan teroris yang berhasil di rehab dan berkontribusi dalam deradikalisasi adalah Nasir Abbas dan Ali Imron.

¹⁷ David Kilcullen, is Chief Strategist in the Office of the Coordinator for Counterterrorism, The State Department, Washington D.C "Counter-Insurgency Redux", hal. 10

¹⁸ Hoeft, Gabriel, 'Soft' Approaches to Counter-Terrorism: An Exploration of the Benefits of Deradicalization Programs dari International Institute For Counter-Terrorism (ICT), hal. 9

¹⁹ Angel Rabasa, et al, "Deradicalizing Islamist Extremists", RAND Corporation, 2010, hal. 109

type of factor	Factors or drivers of radicalization
Devisions	Lack of integration, polarizations, ghettoizations, isolations, weak of leadership / infrastructure, Under-employment, poor educations,
Grievences	political/democratic disenfranchisement, foreign policy, and international conflicts / disputes Political movements, ideologies, faith
Narratives Means	Social/family/criminal networks, vulnerable/risky institutions and places, vulnerable individuals, charismatic individuals

METODE PENELITIAN

penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan apa yang sedang dilakukan oleh gerakan islam nusantara. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana” dan “Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap gerakan anti-terorisme islam nusantara di indonesia”. Penelitian ini mendeskripsikan peran sebuah metodologi pencegahan, dalam hal ini gagasan Nahdlatul Ulama dengan gerakan “Islam Nusantara-nya” untuk aksi pencegahan aksi terorisme di indonesia. Metode deskriptif-kualitatif digunakan dengan mengambil data primer di beberapa komunitas komunitas beserta masyarakat di makassar yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gagasan Islam Nusantara di tingkat internasional

a. Pemerintah

Setelah terminologi “Islam Nusantara” dideklarasikan di muktamar di jombang di tahun 2015, PBNU makin aktif menjalin kerjasama dengan berbagai aktor guna mengantisipasi radikalisme, seperti mengadakan konferensi ISOMIL atau (International Summit of Moderate Islamic Leaders) di jakarta pada mei 2016, Beberapa negara yang mengirimperwakilannyake ISOMIL antara lain Sudan, Libia, Aljazair, India, Rusia, Maroko, Thailand, Inggris, Senegal, Lithuania, Spanyol, Yunani, Korea Selatan, Jordania, Pakistan, Malaysia, Tunisia, dan Arab Saudi.²⁰ Sebelumnya digelar pula konferensi tingkat tinggi organisasi kerjasama islam (OKI) pada tanggal 6-7 maret 2016 di jakarta, pada konferensi tersebut, presiden indonesia joko widodo mempromosikan wajah islam indonesia yang unik, karena bersifat universal namun memiliki ciri khusus yaitu mengakui lokalitas, dan mendukung langkah gerakan NU dengan Islam Nusantaranya dan muhammadiyah dengan Islam berkemajuannya sebagai langkah kedepan guna menyokong pilar kebangsaan dalam memperjuangkan membangun republik Indonesia.²¹

²⁰Agung Sasongko, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/07/20/oam6cs313-nu-galang-kekuatan-ulama-lawan-radikalismediunduh tanggal 21-07-2016 pukul 19;00>

²¹Kendi Setiawan, <http://www.muslimoderat.com/2016/05/aktivis-muslim-asean-keberadaan-nu.html diunduh tanggal 29-7-2016 pukul 21;17>

Dukungan agar gagasan islam nusantara disebarluaskan keseluruh dunia terutama asia tenggara juga dikatakan oleh ratna osman perwakilan dari ASEAN “Progresive Moslem Movement” yang berasal dari malaysia, dia mengatakan di sela sela jeda ISOMIL bahwa islam dimalaysia dikuasai oleh islam versi kerajaan yang konservatif dan menurutnya agak mendiskriminasikan wanita dan anak anak, ada versi progresif dan moderat namun mereka dikontrol oleh kerajaan, islam versi NU sangat penting bagi dunia dan ASEAN itu sendiri, karena itu ASEAN “Progresive Moslem Movement” ingin bekerjasama dengan NU, karna dia melihat bahwa kerjasama negara negara timur tengah dengan NU menunjukkan bahwa gagasan ini memang sangat diperlukan, dan harapanya ASEAN tidak terlambat mengikuti gagasan tersebut.

a. Masyarakat Indonesia di luar negeri

Cabang cabang NU dan Muhammadiyah di luar negeri tak mau kalah antusias menyambut gagasan masing masing organisasi, salah satunya di negara jerman, pimpinan cabang istimewa muhammadiyah jerman dan pimpinan cabang istimewa Nahdlatul ulama jerman bekerjasama mempromosikan nilai nilai Islam Nusantara yang berkemajuan indonesia di kancah internasional, PCIM mengatakan, sudah bukanlah jamanya lagi, NU dan muhammadiyah melihat perbedaan interpretasi ijihad di masa lampau yang tak ada habisnya diperdebatkan, saatnya bersama sama menghadapi dan menyuarakan gagasan yang lebih besar maslahatnya ke seluruh dunia, PCINU menambahkan kedepanya akan memperkuat solidaritas antara NU dan Muhammadiyah dalam merespon isu islamophobia di eropa, dengan mengadakan seminar, konferensi dan pelatihan.

2. Gagasan Islam Nusantara di tingkat Nasional

a. Tingkat Mahasiswa

Pada saat pengambilan data di bidang ini, penulis terjun langsung dengan organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul ulama yaitu PMII (pergerakan mahasiswa islam indonesia) chapter makassar raya, penulis langsung menemui ketua dari PMII yang bernama muhlis, tak jauh beda dengan pendapat para pakar sebelumnya tentang term islam nusantara, muhlis mengatakan islam nusantara sebenarnya sudah lama, Islam nusantara sendiri itu bukan zona, bukan juga produk internal NU, namun islam nusantara sendiri adalah pemikiran timur tengah yang merujuk kepada 4 madzhab masuk ke indonesia dan melakukan interaksi interaksi dengan budaya budaya sehingga menciptakan islam yang rahmatan lil-alamin yaitu menghormati budaya budaya setempat, islam nusantara adalah modernisasi dan pembaharuan nama saja, masalah tidak grounded-nya term islam nusantara dikarenakan banyak masyarakat desa yang tidak bisa mengidentifikasi perilaku perilaku mereka, padahal perilaku mereka sangat NU sekali, contohnya di enrekang yang mayoritas muhammadiyah transformis, setelah PMII turun ke masyarakat, mereka melihat praktek praktek kehidupanya sangat NU seperti mengadakan tahlilan, barazanji, ziarah kubur dan lain lain.²²

Merujuk kepada counterterrorism, menurut muhlis, bahwa ada potensi kemunculan teroris bisa saja dari kalangan kelompok masyarakat manasaja bahkan tidak menutup kemungkinan dari kalangan nahdliyin sendiri. Solidaritas sesama anggota kelompok sangatlah tinggi dalam merespon provokasi, model-model provokasi bisa berupa kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang berbeda terlalu digembar-gemborkan, seperti gagasan islam nusantara yang menghargai kultural, bisa saja menjadi provokasi bagi kelompok lain untuk melakukan counter-ideologi bahkan counterattack ke kalangan NU dengan membuat suatu gerakan baru seperti NU garis lurus, yang anehnya muncul dari kalangan internal NU sendiri, dalam sejarah NU juga punya catatan kelam aksi teror dimana provokasi yang dilakukan PKI saat itu dengan membunuh para ulama dibalas dengan aksi brutal kaum Nahdliyin dengan cara membunuh orang yang diidentifikasi sebagai pembunuh ulama.²³

²² Anom Prihantoro, <http://www.antaranews.com/berita/545323/muhammadiyah-nu-promosikan-demokrasi-nusantara-di-germanunduh tanggal 31-07-2016>

²³ Wawancara Dengan Muhlis Ketua PMII Makassar Raya Pukul 14;12 Tanggal 20-0-206

Solidaritas sesama anggota kelompok sangatlah tinggi dalam merespon provokasi, model-model provokasi bisa berupa kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang berbeda terlalu digembar-gemborkan, seperti gagasan islam nusantara yang menghargai kultural, bisa saja menjadi provokasi bagi kelompok lain untuk melakukan counter-ideologi bahkan counterattack ke kalangan NU dengan membuat suatu gerakan baru seperti NU garis lurus, yang anehnya muncul dari kalangan internal NU sendiri, dalam sejarah NU juga punya catatan kelam aksi teror dimana provokasi yang dilakukan PKI saat itu dengan membunuh para ulama dibalas dengan aksi brutal kaum Nahdliyin dengan cara membunuh orang yang diidentifikasi sebagai pembunuh ulama.

Dalam era sekarang, provokasi dari masing masing apparatus hegemony bisa muncul dari mana saja termasuk media, tak sedikit video video dan situs situs tersebut mudah ditemukan di internet, dimana beberapa organisasi melakukan latihan latihan bersenjata dengan berbagai macam kepentingan, hal tersebut akan membuat organisasi atau entitas lainnya akan siap siaga apalagi videonya bermuatan aksi ancaman teror, dalam kajian hubungan internasional interaksi demikian disebut security dilemma.

Ada juga kasus situs situs radikal yang sudah dicekal pemerintah karna bermuatan propaganda, hal ini tujuannya untuk mencegah kaum remaja yang sebagian besar menggunakan internet terjerumus dalam tindakan tindakan teror, dalam hal ini PMII sebagai afiliasi NU di bidang kemahasiswaan bertanggung jawab mencegah menyebarkan pemikiran pemikiran radikal yang berpotensi teror, Kerja PMII intinya bagaimana membentuk pemikiran kader tentang berperilaku moderat yang akhirnya mempertahankan NKRI dengan nilai nilai islam, karena pemikiran radikal tersebar luas di universitas universitas negeri yang menurut muhlis mudah dimasuki dibandingkan dengan universitas islam.²⁴

Adapun program program dari PMII makassar raya yaitu pembentukan tim 9 guna mempercepat kaderisasi dan menyebarkan gagasan islam nusantara, setiap bulanya 9 orang diutus dari kader PMII untuk menguatkan basis atau memperluas nilai nilai NU, angka sembilan (9) dalam NU adalah angka sakral, cara kerja tersebut terinspirasi dari cara kerja kaderisasi katolik yaitu kasbul atau kaderisasi sebulan untuk mencegah pemahaman pemahaman yang dianggap mengancam organisasi (M.sembodo) Selain itu PMII rajin berziarah atau menjalin silaturahmi ke rumah rumah para ulama untuk meminta ilmu dan juga meminta berkah, kerna PMII menganggap seseorang dapat menjadi menjadi teroris karna berguru namun ilmunya tidak diberkahi, berkah dalam artian didoakan oleh para ulama agar ilmunya bermanfaat dan dijalankan untuk kemaslahatan ummat, selain itu kerjasama dalam bentuk diskusi dengan TNI dan kepolisian juga sering dilaksanakan.

²⁴Wawancara Dengan Muhammad Tonang Cawidu Ketua Gp Ansor Sul-Sel Pukul 13:49 Tanggal 04/08/2016

Secara tertulis, tidak ada kerjasama resmi antara PMII dengan organisasi kemahasiswaan keagamaan lainnya, tapi seperti diskusi rutin dengan GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) atau organisasi lainnya masih sering terjadi, menurut muhlis, GMKI mendukung nilai islam nusantara yang ingin mempertahankan pancasila, Kolaborasi di tingkat kepemudaan sangat penting dijalin untuk mencegah tindakan terorisme, jalinanan kerjasama pun dilakukan bukan hanya di hanya sesama pemuda muslim lainnya yang pancasilais tapi meluas dengan mencakup organisasi kepemudaan agama lainnya yang juga pancasilais, tentunya kolaborasi lintas agama yang dilakukan pemuda menurut penulis sangatlah efektif demi mencegah potensi tindakan teror yang sangat riskan terjadi di kalangan pemuda, dan bisa disimpulkan tradisi NU seperti kepatuhan kepada ulama masih dijaga oleh pemuda NU dan inovasi budaya yang baik layaknya meniru kaderisasi walaupun dari agaman lain, kaulau hal tersebut bermanfaat bagi manusia maka layak ditiru, mengindahkan riwayat yang mengatakan "siapa yang meniru budaya kafir maka ia termasuk golongan kafir", secara tekstual, riwayat diatas mengindikasikan masyarakat muslim harus kreatif, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada tanpa menginovasi, pertanyaan muncul ketika bagaimana jika masyarakat muslim tidak mampu menciptakan sesuatu dengan alasan riwayat diatas, maka kesimpulannya masyarakat muslim akan tertinggal, jalan satu satunya ialah mengambil semua pelajaran yang diberikan tuhan dibumi, serta saran nurcholis madjid ini "Maintain that which is old and good, and embrace that which is new and better., yang artinya menjaga budaya lama yang baik, dan mengambil budaya baru yang lebih baik.

3. Gagasan dan Gerakan Islam Nusantara di Masyarakat Indonesia

Dalam analisis Machrus Irsyam (1981; 37-39), terdapat tiga pilar utama kekuatan politik yang dimiliki GP Ansor termasuk dalam hal ini NU di tingkat kemasyarakatan, yaitu pertama, basis massa (struktur sosial) yang bertumpu pada massa pondok pesantren yang berada di pedesaan. Kedua, Basis ulama-politisi yang digambarkan memiliki konsistensi gerakan karena berfungsinya dua struktur yang saling melengkapi, struktur formal yang diatur secara organisatoris dan struktur non formal yang tumbuh dari interaksi antara ulama dan politisi dan ketiga, tradisi yang dimanifestasikan dalam pola hubungan ulama-politisi-massa menjadi tradisi yang dianut secara teguh.

Hadirnya islam di dindonesia mempunyai sejarah panjang dan dihimpun sebagai satu negara yang didalamnya, manusianya bersaudara, sebelum islam masuk ada banyak suku budaya di indonesia, setelah islam masuk ada asimiliasi budaya, berdampingan dengan semua golongan yang berbeda ditanamkan dari era walisongo, budaya budaya yang dulu tidak serta merta diberangus tapi diperbaharui jika melenceng dan diisi dengan nilai nilai islam timur tengah, menurut tonang adanya term islam nusantara karna indonesia dulunya namanya nusantara termasuk negara negara lain yang melayu, yang mengindikasikan islam di melayu umumnya dan indonesia khususnya ramah dan bisa berdampingan.

Secara lokal, aktivitas terorisme menurut ansor bukan hanya bersifat massiv dan menimbulkan banyak korban jiwa, tapi juga kekerasan yang mengatas namakan ormas islam itu juga bisa dikatakan sebagai teroris, metode berda'wah dengan membawa nafsu yang ditempelkan dengan atribut islam, akan memunculkan penilaian bagi orang awam bahwa atribut yang ormas pakai mencirikan ajaran yang dianut, padahal penilaian tersebut salah, antara atribut dan substansi ajaran berbeda. Secara global, tonang melihat ada organisasi transnasional yang ingin mengembalikan pemurnian ajaran islam berdasarkan al-quran dan hadist, kelompok kelompok itu bisa diidentifikasi melalui tujuan mereka yaitu mendirikan khilafah atau negara islam, entitas entitas inilah yang berbahaya bagi indonesia, bentuk ancaman bermacam macam.

Herwin

Ada yang nyata dengan melakukan aksi kekerasan yang massiv dan adapula menggunakan gerakan da'wah, gerakan pendidikan melau SDIT, bahkan masuk juga ke wilayah politik, untuk mencegah dan menyaingi hal tersebut, ansor melakukan Counter dengan tujuan, pertama: yaitu menjaga tradisi tradisi islam ahlussunnah wal jamaah, kedua: meneguhkan NKRI, caranya, secara internal ansor melakukan edukasi kepada semua kalangan nahdliyin dan memperbaiki struktur sampai ketinggian ranting dan memperingatkan ancaman ancaman gerakan radikal, secara eksternal jika ada kampanye kampanye negara islam maka ansor telah meminta izin kepada pangdam untuk mencabut semua atribut yang mengkampanyekan negara islam, sedangkan respon kepada gerakan penyebarluasan paham radikal semacam ruang belajar kecil kecilan, maka ansor merespon dengan diskusi untuk mencegah fitnah dan informasi salah terhadap gagasan islam nusantara.

Kerjasama kerjasama pun dilakukan dengan pemerintah daerah kota makassar, bupati bupati di daerah, kementerian agama, kementerian pendidikan, polisi, tentara, ormas kristen, walubi, persatuan gereja gereja indonesia, masyarakat muslim tionghoa, termasuk dengan BNPT provinsi yaitu FKPT, kerjasama kerjasama tersebut bukan hanya terjadi di satu daerah tapi beberapa daerah lain juga dengan menambah aktor kerjasama yang dianggap perlu, kolaborasi dengan berbagai stakeholder akan membuat ruang gerak terorisme semkain sempit,. Dalam perjalananya, gp ansor sangat kontroversial, ada anggapan bahwa, ansor atau banser lebih mengutamakan agama lain daripada islam itu sendiri, seperti menjaga gereja, dalam hal tersebut tonang mengklarifikasi bahwa kegiatan menjaga gereja menjelang misa adalah atas nama kemanusiaan, karna siapa yang bisa menjamin keamana misa sedang ancamanteror pada malam misa sangat ada dan nyata, tanggung jawab pemerintah tentunya dan dibantu oleh ansor tak lain demi kemanusiaan ansor mempersiapkan nahdliyin agar paham dan gerak teror tidak menyebarluas di indonesia, dengan membentuk beberapa gerakan islam nusantara yang berkonsentrasi di bidang keamanan dan kemanusiaan, antara lain :

- dengan membentuk DENSUS 99, fungsinya pencegahan terhadap gerakan munculnya teroris, selain itu Densus 99 juga melakukan monitoring dan manakala menemukan tindak kekerasan harus dilaporkan kepada aparat. Kalau aparat tidak sanggup, Densus 99 wajib menangkap teroris itu, densus ini tidak ada kaitanya dengan densus 88 milik pemerintah, pembentukan ini menunjukkan keseriusan Banser dalam menjaga NKRI,
- Banser tanggap bencana (BAGANA), Kelompok ini adalah orang orang yang siap diturunkan dalam operasi penyelamatan di saat bencana, tugas bagana yaitu Melaksanakan program sosial kemanusiaan dalam kerangka penanggulangan bencana sejak masa kesiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi hingga pemulihan akibat bencana, kelompok ini juga diambil dan dilatih oleh pemerintah untuk turun di daerah rawan bencana, ikutnya bagana dalam taruna bencana negara sendiri diinisiasi oleh mentri sosial khofifah indar parawansa, terlepas dari beliau juga sebagai ketua muslimat NU, kerjasama ini merupakan upaya Kemensos untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau organisasi masyarakat lebih merespon ancaman atau potensi bencana di lingkungannya masing masing, dan menjadi lini paling bawah yang bisa mencegah bencana dan merekrut anggota masyarakat dengan memberikan pelatihan siap siaga bencana.
- Banser lalu lintas (BALALIN) Adalah Satuan Khusus Banser yang mempunyai tugas membantu aparat sebagai penyelenggara dan pembina fungsi ketertiban lalu lintas, di antaranya meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas , kiprahnya telah terbukti pada saat arus mudik di jawa, dan bekerjasama dengan pihak kepolisian yang secara tehnis mendapat dukungan dari kepolisian , bukan hanya didukung namun juga dilatih oleh kepolisian.

- Banser relawan pemadam kebakaran (BALAKAR), Satuan ini memiliki fungsi pelaksanaan dan pemeliharaan pengelolaan peralatan, kendaraan dan perlengkapan pemadam kebakaran; pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran; pelaksanaan kerjasama dengan instansi Pemerintahan maupun swasta yang berkaitan dengan alat pemadam kebakaran, dan pengelolaan kegiatan penatausahaan, satuan inipun diajak bekerjasama oleh walikota makassar, pengukuhan 200 anggota Balakar (Barisan Relawan Kebakaran), diharapkan mampu memperkuat barisan Dinas Pemadam Kebakaran dari ancaman bahaya kebakaran.

- Banser anti narkoba (BANAR), ketua umum GP anshor yaqut cholil qoumas juga meresmikan banser yang khusus memerangi narkoba, menurut gus yaqut, mereka bekerjasama dengan pihak BNN dan kementerian sosial, langkah awal GP anshor dalam memberantas narkoba yakni pemeriksaan urin seluruh jajaran pengurus GP anshor tahun 2015-2020, selain itu kerjasama juga dilakukan dengan pemerintah di tingkat daerah untuk memerangi narkoba seperti di temanggung jawa tengah, pelatikan dan pengukuhan banser anti narkoba tersebut langsung dipimpin oleh kapolres temanggung, menurut AKBP Wahyu Wim Hardjanto, terbentuknya Badan Anshor Antinarkoba semakin mengukuhkan bahwa BNN, Polri dan TNI mendapat amunisi baru melawan narkoba. Tugas utamanya, adalah secara preventif menjaga diri lingkungan dan keluarga dari bahaya narkoba, serta memberi informasi, namun untuk penindakan tetap menjadi wewenang kepolisian dan BNN. Hal serupa terjadi juga di Manado, banser yang interns berkomunikasi dengan pemuda lintas iman, akan bersama sama mencegah narkoba masuk ke dalam ke dalam pesantren dan gereja.

- Banser husada dan banser maritim, dan pemberdayaan kelompok tani, Banser husada dan banser maritim adalah satuan yang terakhir dideklarasikan, guna menjaga kekayaan dan kedaulatan NKRI khususnya di laut, sedangkan banser husada bertujuan untuk Melaksanakan program sosial kemanusiaan dalam kerangka kesehatan masyarakat, serta menciptakan sumberdaya manusia yang peduli terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, adapun satuan yang fokus terhadap pemberdayaan petani dalam NU adalah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), lembaga tersebut akan memperkuat kelembagaan kelompok tani dengan kelompok distributor, dan corporate farming, maupun dengan kelompok lainnya untuk mendorong kelompok tani mendapat nilai keuntungan yang semestinya dari sistem ijon dan tengkulak, advokasi yang diberikan LPPNU juga dibarengi dengan pelatihan kepada petani dan anggota anshor sendiri dalam mengembangkan pertanian organik dari kotoran ternak, karna sebagian anggota banser adalah kelompok tani yang perlu mendapat perhatian dan pemberdayaan yang akhirnya tidak mengandalkan pupuk kimiawi.

4. Kedaulatan Indonesia sebagai faktor yang berpengaruh terhadap hadirnya islam nusantara dan gagasan ormas pancasilais lainnya.

a. Respon Wahdah Islamiyah terhadap Islam Nusantara

Jika NU menggemakan islam Nusantara dan muhammadiyah dengan islam berkemajuannya, wahdah juga mempunyai gagasan yakni islam wasathiyah, yaitu islam yang tidak kiri (radikal) tidak pula kanan (liberal), wahdah menempatkan dirinya di tengah (moderat), metode da'wahnya pun ternyata tidak jauh beda dengan Nahdlatul ulama, pendekatan yang tidak memaksa dan lebih humanis, "term" wasathiyah muncul di muktamar terakhir yang berlangsung di jakarta, sama seperti NU, pengoperasian nilai nilai "wasathiyah" sebenarnya sudah berlangsung lama, sejak wahdah didirikan, term "wasathiyah" lahir untuk mengisi ruang kosong islam nusantara dan islam berkemajuan, kehadirannya tidak untuk menggeser NU dan Muhammadiyah, menyediakan wadah baru untuk lebih memperkuat islam di tataran masyarakat.²⁵

²⁵ Wawancara dengan abdurrahim ketua DPW wahdah islamiyah sul-sel pukul 10⁰⁰:57 tanggal 9-08-2016

Keistiqamahan wahdah dalam menampilkan nilai nilai islam hanya untuk mempertahankan sunnah atau ajaran yang telah diwariskan nabi, tidak mengadopsi kebudayaan tapi berlandaskan sunnah, sunnah menjadi patokan utama, adapun jika budaya sarungan yang sesuai dan tidak melanggar, pihak wahdah tetap menghormati, atribut islam yang dipakai memang sama dengan yang dipakai teroris, namun stereotyping atribut dengan perilaku seseorang tersebut salah, sama halnya ada stereotyping bahwa "orang makassar kasar" hanya karna perilaku seseorang yang pernah mengasari yang kebetulan orang makassar" tertanam di pikiran seseorang.

Selanjutnya penulis kembali menayakan potensi teror menurut wahdah, mereka tidak mengetahui apa sebenarnya term "teror" dan "teroris", jangan sampai menurut abdurrahim orang yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar (melakukan kebaikan dan menghindari keburukan) dianggap teroris oleh orang-orang non-islam, ataukah kemudian ada orang sedikit agak berbeda dengan pandangan masyarakat umum atau pemerintah, masyarakat menganggap teroris contohnya santoso, sekalipun pemerintah memvonis dia sebagai teroris, tapi ada beberapa kelompok masyarakat yang datang mengunjungi proses pemakaman yang secara tidak langsung ada dukungan untuk dia, boleh jadi latar belakang seseorang menjadi teroris karna ada ketidakadilan, ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Pendekatan pemerintah terhadap terduga teroris seharusnya bukan dengan cara kekerasan, kalau pendekatan persuasif bisa dilakukan kenapa tidak, wahdah berkesimpulan, ada beberapa pendekatan densus terhadap terduga teroris yang tidak manusiawi, seharusnya pendekatannya persuasif, tidak menembak langsung, tapi harus melewati proses pengadilan. Ada juga pola hubungan antara masyarakat dengan organisasi yang divonis pemerintah sesat seperti Gafatar (gerakan fajar nusantara). Masyarakat harusnya tidak boleh mengusir mereka, membakar rumah mereka dll, pemerintah dan masyarakat harus melindungi yang terzalimi dan saling menasehati dalam kebaikan, bukan saling mengancam dan melakukan kekerasan. Wahdah islamiyah pun secara tegas mengutuk berbagai macam kekerasan apalagi tindakan terorisme yang korbanya bisa saja dari kalangan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan target teroris.

Secara umum wahdah islamiyah tidak mempunyai gerakan anti-teror layaknya banser dengan densus 99nya, tapi wahdah konsisten mengirim da'i-da'i mereka ke kampus-kampus, keluar kota-bahan daerah-daerah terpencil, dengan metode membuat seminar, kultum, ceramah di mesjid, serta ikut berembuk dengan pemerintah tingkat-bahwa seperti RT/RW, tebar da'i nusantara namanya yaitu program wahdah dengan mengirim da'i ke pelosok-pelosok terpencil, berbeda dengan jemaah tabligh yang "kharuj" atau berda'wah kurang lebih tiga hari di mesjid, wahdah menempatkan da'inya dalam jangka waktu yang lama, 2 tahun hingga seumur hidup, selain berda'wah wahdah bergerak juga di bidang sosial, pendidikan dan lingkungan hidup, dibidang sosial mereka memiliki ambulans, mengirimkan bantuan terhadap korban bencana alam.

Kerjasama dengan pemerintah pun dilaksanakan, ketua wahdah islamiyah menjadi sekretaris jendral MUI pusat, kerjasama antar pemerintah kota, daerah dan organisasi lainnya, menurut wahdah pemerintah itu teman, bahkan wahdah islamiyah tidak bisa berdiri tanpa izin dari pemerintah, wahdah juga ikut keputusan pemerintah terkait penetapan idul fitri dan idul adha, kerjasam juga dibuat oleh sesama ormas islam baik itu diinisiasi oleh ormas atau pemerintah, cakupannya bisa sesama ormas islam atau lintas agama seperti keberadaan forum komunikasi umat beragama (FKUB) dimana wahdah ikut berpartisipasi di dalamnya, tujuannya bagaimana mempertahankan NKRI walaupun beragam.

³⁴U.S Mission to OSCE. 2016. Russia's Ongoing Violations In Ukraine. Diakses dari <https://osce.usmission.gov/russias-ongoing-violations-ukraine-statement-pc-4-2/> diakses pada tanggal 3 Juli 2017

³⁵Unian. 2017. OSCE announce lack of information regarding withdrawal of weapons near Avdiyivka. Diakses dari <https://www.unian.info/war/1768802-osce-announces-lack-of-information-regarding-withdrawal-of-weapons-near-avdiyivka.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2017

³⁶Robert Golanski. 2016. One Year After Minsk II: Consequences and Progress. Hal.71. diakses dari <https://link.springer.com/article/10.1007/512290-016-0398-2> diakses pada tanggal 21 Agustus 2017

Wahdah menilai gagasan islam nusantara yang didengungkan NU pasti memiliki kemaslahatan didalamnya, begitupun metode muhammadiyah, pasti memiliki kemaslahatan, jika ormas ormas tersebut datang dan tidak memandang sebelah mata gagasan ormas lain maka gerakan civil society ini akan menjadi potensi pemersatu bangsa. Pemuda khususnya yang menjadi motor penggerak bangsa yang akhirnya bisa berubah menjadi potensi dan bisa juga menjadi lawan, maka itu wahda menyarankan pemuda harus cerdas memilih ormas, agar tidak tersesat, jika pemuda dan ormasnya tegu pada nilai nilai bangsa dan agama maka tidak perlu pemerintah membuat undang undang yang mengatur tentang hubungan antar masyarakat dan pemerintah, karna ormas dan agama sudah memerintahkan terlebih dahulu yang mengadopsi nilai nilai keagamaan.

5. Pemahaman islam nusantara dalam konsep Counterterrorism

a. Payung hukum pencegahan pemahaman terorisme

Counterterrorism adalah ranah kepolisian untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap teroris, maka itu perlu payung hukum untuk melegalkan gerakan kepolisian dalam hal ini intelijen densus 88, tugas intel adalah memberikan peringatan dini dan deteksi dini kepada aparat keamanan dan pemerintah, Dengan berbagai metodologi dan analisis yang dilakukan intel biasanya dapat memperkirakan pola-pola serangan terror dan kapan terorisme mungkin terjadi (diyauddin), UU antiteror yang kurang diketahui masyarakat dalam hal ini peran intelijen membuat counterterrorism harus mudah diakses oleh publik guna diketahui secara umum, langkah intelijen pun masih menemui hambatan karna tidak adanya payung hukum yang melindungi pada saat tindakan proaktif pencegahan teroris di awal kemunculanya.²⁶

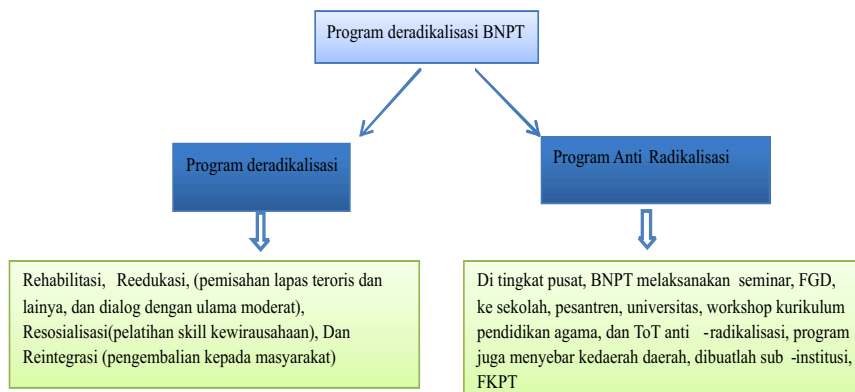
UU yang berlakupun yaitu UU no 15 tahun 2003 sudah dianggap usang dan tidak mendukung langkah pencegahan sekaligus tidak melihat aktor lain pendukung terciptanya teroris, jalan keluarnya ialah mengamandemen UU No. 15 tahun 2003 untuk memungkinkan adanya strategi pre-emptive yang lebih efektif dalam rangka deteksi aktivitas terorisme, yang bertujuan agar intelijen dapat bergerak untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif melalui izin peradilan berdasarkan bukti-bukti intelijen diawal. Intelijen tidak memiliki wewenang untuk menangkap karena hal tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan . Bukti "samar" intelijen tidak dapat menjadi bukti sah untuk membawa teroris ke pengadilan kecuali disertai bukti valid. namun dalam mengumpulkan informasi secara lebih luas pengadilan dalam hal ini mengizinkan hal tersebut, Pendekatan intel saat itu lebih pada penyesuaian pola dan model gerak kelompok terror. Karna kelompok terror sifatnya asimetrik, maka apa yang dilakukan intelijen lebih rumit dari era sebelumnya. Sharing information sekarang menjadi salah satu bentuk yang sangat baik dilakukan antara dinas intelijen diberbagai Negara, yang terjadi adalah kerjasama intelijen dalam lingkup global. Sementara dalam konteks nasional, hal itu juga dilakukan. Keberhasilan aparat menembak mati santoso adalah bukti nyata sharing information intelligence dan kerjasama lintas sektoral antar instansi keamanan

Masalah yang lain pun datang dari aspek yuridis dalam mengatur tindakan tindakan yang menyangkut penyebaran kebencian terhadap suatu paham atau ideologi tertentu, yang bisa saja menjadi trigger untuk melakukan tindakan teror, untuk itu harus dibuat semacam aturan tegas bahwa perluasan informasi akan penggunaan kekerasan secara terang terangan akan dibawah ke meja hijau. Counterterrorism juga harus menjunjung tinggi supremasi hukum, diskriminasi tidak boleh disematkan kepada suatu kelompok agama, ras atau golongan tertentu, dalam hal ini densus harus independen dalam menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan dari manapun.

²⁶Wawancara dengan diyauddin aktivis peneliti kajian strategik intelijen indonesia dari Indonesia Intelligence Institute (I3) pada tanggal 8-2016

Herwin

NU sendiri mendukung pemerintah untuk melakukan revisi Undang-undang Terorisme guna pengaktifkan langkah pencegahan dan penindakan terhadap aksi terorisme UU antiterorisme yang ada sekarang masih belum dapat menjangkau berbagai tindakan yang berpotensi mengarah dan mengancam terwujudnya aksi teror di Indonesia. Misalnya, WNI yang ikut pelatihan perang di luar negeri oleh kelompok terduga terorisme. “Bahkan WNI yang teridentifikasi bergabung dengan ISIS dan melakukan aksi teror di luar negeri pun kembalinya di Indonesia tidak dapat disentuh berdasarkan UU Terorisme yang ada sekarang ini, kendala yang dihadapi juga ialah koordinasi antara Polri, TNI, BIN dan BNPT belum terpadu, banyak pendapat yang memperkirakan pada akhirnya, penguatan langkah pencegahan oleh intelijen dalam revisi UU antiterorisme ini semakin meningkat, namun NU mengingatkan revisi tidak boleh melampaui kewenangan yang dijamin oleh konstitusi kepada warga negara, meskipun terhadap terduga teroris karna proses revisi masih berjalan, jika revisi nantinya memaksimalkan peran pencegahan intelijen, NU berharap intel tidak menjadi polisionil, biarkan tugas penangkapan dijalankan oleh kepolisian.



a. Kolaborasi lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan

Program program yang dilakukan BNPT di tingkat daerah membawa penulis mewawancarai pihak FKPT, dalam wawancara tersebut FKPT melihat Indonesia saat ini masih aman dari ancaman radikal dan terorisme, sangat jauh berbeda dengan situasi di kawasan timur tengah,, menurutnya perbedaan itu terletak pada kuatnya ormas moderat yang mempunyai kekuatan civil society, jadi persatuan secara internal di beberapa negara arab rapuh di tingkatan masyarakat, sedangkan di Indonesia ada beberapa ormas yang moderat, setia kepada NKRI dan mempunyai basis massa yang besar, yang mampu mengendalikan tatanan sosial masyarakat hingga tercapai kondisi sekarang ini, ormas tersebut secara gamblang disebut oleh FKPT adalah NU dan Muhammadiyah, jika peran kedua ormas tersebut menurun maka akan sangat berbahaya kedepannya, jika keduanya kalah hegemony dari ormas ormas yang anti-pancasila maka potensi kerusakan di Indonesia 2 kali lebih dahsyat dari kerusakan yang terjadi akibat Arab Spring, mengapa ancamannya 2 kali lipat, karna negara Arab kecil, sedangkan Indonesia besar dan majemuk yang potensi terpecah belahnya juga besar,

Ancaman dari ormas tersebut ialah yang mempunyai ideologi transnasional dan tidak menginginkan nasionalisme, dalam hal ini pembentukan khilafah, dimana secara sistem, semua penduduk Islam dimuka ini harus tunduk pada satu pemimpin, menurut FKPT ideologi tersebut mustahil dioperasionalkan, negara negara Arab yang notabene kecil sangat sulit disatukan secara politis oleh pemimpinnya, apalagi menyatukan seluruh penduduk muslim muka bumi untuk patuh terhadap satu pemimpin.

Untungnya, Indonesia memiliki NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiya dan beberapa ormas moderat yang menilai NKRI adalah sesuatu yang final, adapun tentang bagaimana pelaksanaan syariat Islam silahkan dijalankan pribadi pribadi menurut interpretasi para pemimpin ormas, yang tidak perlu diformalisasi atau distrukturalkan karena secara umum, undang undang yang ada telah dimasuki nilai nilai Islam, seperti UU zakat, UU wakaf, UU perkawinan dan lain lain, yang mengindikasikan Indonesia telah melaksanakan syariat Islam tanpa harus menyebutkan negara Islam, biarkanlah syariat Islam hidup di tengah tengah masyarakat.

Dalam mencegah terorisme, FKPT rutin menjalin kerjasama dengan ormas moderat, setengah moderat, dan bahkan ormas yang diindikasikan radikal, dikemas melalui bedah buku, seminar, tudang sipulung, simposium, forum group discussion, dan lainnya, kerjasama juga diperluas dengan merangkul pesantren, imam imam mesjid dan dai dari semua ormas moderat, dai tersebut disebar untuk menyiarkan paham Islam rahmatan lil alamin di bulan Ramadhan tahun 2016, Terakhir acara yang dilaksanakan FKPT ialah mengundang semua media di sul-sel terlibat aktif untuk bagaimana membentengi masyarakat dari paham radikal, dan bagaimana menyiarkan pemberitaan yang baik agar masyarakat tidak terpancing propaganda glorifikasi terorisme.

FKPT melihat potensi terorisme ada pada anak muda di umur produktif, yang punya semangat, tapi pemahaman yang minim tentang agama, dan menganggap semangat jihad itu membunuh, di rentan umum 18-39 tahun, masih labil. Monitoring secara konsisten terus dilakukan FKPT, ada di sekolah dan juga pesantren, terutama di sul-sel, networking pun dijalankan dengan para kyai dan guru guru, guna mencegah masuknya paham radikalisme, terakhir FKPT membuat perlombaan atau sayembara antar SMU sederajat untuk membuat video pendek berdurasi 5 menit tentang menghargai perbedaan.

Dalam hal merespon kegiatan ormas ormas, FKPT sangat mengapresiasi kegiatan sosial yang diinisiasi oleh ormas ormas berbasis agama, apapun yang dilakukan untuk kebaikan bersama dan membentengi masyarakat dari paham radikalisme, sangat didukung, apapun caranya, menurutnya FKPT, pemerintah harus dibantu, membina masyarakat bukan hanya kewajiban pemerintah menurutnya, adalah hak semua untuk menasehati kebaikan dan kebenaran, jika pemerintah sendiri melaksanakan pencegahan menurut Muammar yang juga sekertaris NU, semua tokoh agama berdosa, terutama para ustad, kyai karena tidak menjelaskan apa itu Islam yang benar.

Ancaman dari ormas tersebut ialah yang mempunyai ideologi transnasional dan tidak menginginkan nasionalisme, dalam hal ini pembentukan khilafah, dimana secara sistem, semua penduduk Islam dimuka ini harus tunduk pada satu pemimpin, menurut FKPT ideologi tersebut mustahil dioperasionalkan, negara negara Arab yang notabene kecil sangat sulit disatukan secara politis oleh pemimpinnya, apalagi menyatukan seluruh penduduk muslim muka bumi untuk patuh terhadap satu pemimpin.

Untungnya, Indonesia memiliki NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiya dan beberapa ormas moderat yang menilai NKRI adalah sesuatu yang final, adapun tentang bagaimana pelaksanaan syariat Islam silahkan dijalankan pribadi pribadi menurut interpretasi para pemimpin ormas, yang tidak perlu diformalisasi atau distrukturalkan karena secara umum, undang undang yang ada telah dimasuki nilai nilai Islam, seperti UU zakat, UU wakaf, UU perkawinan dan lain lain, yang mengindikasikan Indonesia telah melaksanakan syariat Islam tanpa harus menyebutkan negara Islam, biarkanlah syariat Islam hidup di tengah tengah masyarakat.²⁷

²⁷Wawancara dengan Muammar Bakry, Kepala bidang Agama, Pendidikan dan Dakwah FKPT, sekaligus wakil rektor IV UIM tanggal 9-8-2016 pukul 11:47

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perbedaan penafsiran antar ormas bagaikan berbedanya jalan satu tujuan (kebaikan pengikutnya), jalan atau proses yang ditempuh NU dengan nilai nilai islam nusantara yaitu tasamuh atau moderat, di ormas lain mungkin dengan niat baik (berda'wah) namun caranya penyampaian yang menggunakan kekerasan yang akhirnya bisa menimbulkan stigma bahwa islam secara keseluruhan adalah ditebar dengan cara kekerasan, padahal trigger dari stigma itu hanyalah beberapa kelompok kecil yang mungkin didesain oleh pihak pihak yang ingin menghancurkan islam dengan cara adu domba
2. Term islam nusantara bukanlah agama dan sekte baru, melainkan "counterattack through term" gencarnya paham radikal dan teroris yang muncul untuk merusak islam dan indonesia, secara substantif term islam nusantara tidak ada bedanya dengan islam kultural, islam sarungan, islam berkemajuan dan islam wasathiyah milik wahdah islamiyah, yang memiliki visi NKRI harga mati, untuk menjaga kedaulatan NKRI, ormas ormas moderat tersebut bersama memunculkan terminologi untuk melawan terorisme dengan nilai nilai luhur yang mereka yakini masing masing
3. Perbedaan pola penafsiran wajar ketika muslim diluar sana diinjak injak dan atas nama solidaritas kelompok yangb tidak bisa menerima melakukan hal yang sama, namun yang harus diperhatikan adalah aktor yang bermain, jika beberapa kelompok muslim tersebut melakukan kekerasan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan aktor yang melakukan kekerasan kepada muslim diluar sana yang kebetulan tinggal di indonesia, tolong menolong dalam hal menjaga keamanan tidaklah harus diskriminatif, hemat penulis menjadi muslim yang memiliki solidaritas tinggi sesama muslim tidaklah cukup, menjadi ikhsan yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan atau nilai ramah dan toleran yang akan membuat dan memperkuat nilai keislaman seseorang dan itulah yang dicontohkan the only role model, muhammad, yang membentuk piagam madinah.
4. NU sudah berusaha terlibat dalam program counterinsurgency dan counterterrorism (apakah inisiasi atau dirangkul), dalam counterinsurgency klasik, NU dengan sejarahnya turut aktif memberantas insurgent (melalui resolusi jihad), kekinianya ada banser yang membentuk densus 99 untuk vis-a-vis dengan teroris, dukungan dari masyarakatpu di dapat dalam hal ini hearts and minds untuk melawan insurgent, hal tersebut dibuktikan banyaknya jumlah Nahdliyin dan pendukung nilai nilai islam nusantara dalam mencegah teror, dukungan dari masyarakat minoritas pun didapat karna banyak nilai nilai islam nusantara yang bersifat humanis tanpa sekat agama yang akhirnya menjaga kebersamaan demi NKRI, upaya intensif dalam counterinsurgency klasij juga sudah diupayakan yaitu menaruh banser di tempat dimana munculnya teroris, kontroversial memang ketika NU menjaga gereja atas nama kemanusiaan, itu dilakukan demi menjaga kemanusiaan, bukan niat lain lain, sedangkan komunikasi dan kordinasi yang baik dari tingkat bawah IPNU-IPPNU-PMII-Ansor hingga pengurus pusat NU untuk mencegah masuknya paham radikal
5. Dalam moderen counterinsurgency, selain kuatnya NU di desa dan kesitaanya pada pusat atau pemerintah, networkingpun dilakukan dengan aktor aktor internasional, kehadiran NU afganistan contohnya, yang mengindikasikan secara substantif nilai nilai islam nusantara bukan hanya untuk indonesia namun juga masyarakat global sekalipun secara tekstual menggunakan term "nusantara", konferensi banyak diikuti dan diinisiasi oleh NU untuk menyebarluaskan islam toleran dan moderat contohnya konferensi ISOMIL.

6. Munculnya ormas ormas islam yang diduga memiliki paham radikal dan juga oknum perusak atau teroris menjadi faktor berpengaruh hadirnya term term yang dikumandangkan ormas ormas moderat, tujuannya sebagai langkah perlawanan melawan ormas berpaham radikal atau teroris beserta apparatus hegemony-nya, perbedaan term bukan untuk bersaing namun bekerjasama dalam penguatan nilai nilai islam yang cinta tanah air, sekalipun memiliki term yang berbeda
7. Counterterrorism yang dilakukan pemerintah dalam hal menyediakan payung hukum dan pengambilan kebijakan terhadap langkah pencegahan sudah dilaksanakan, keterlibatan ormas dan NU pun dibutuhkan untuk memberi saran bagaimana merepon berubahnya metode metode teroris melancarkan aksinya, kekuatan pendukungpun islam nusantara yang cinta tanah air di tingkat legislatif kuat sehingga terciptalah kondisi sekarang yang damai karna dimulai dari pembuatan payung hukum yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Wahid, Abdurrahman. 2009. "Ilusi Negara Islam". Jakarta: The Wahid Institute

Galula, David. 2006. "Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice". United States: Praeger Security International

Rabasa, Angel, Pettyjohn, Stacie, Ghez, Jeremy, Bouce, Christopher. 2010 "Deradicalizing Islamist Extremists", Santa Monica, CA, RAND Corporation,

Jurnal :

Kilcullen, David. 2006, "Counter-Insurgency Redux" The State Department, Washington D.C.

Hoefl, Gabriel, 2015. 'Soft' Approaches to Counter-Terrorism: An Exploration of the Benefits of Deradicalization Programs, International Institute For Counter-Terrorism (ICT),

Wawancara :

Wawancara dengan muhlis ketua PMII makassar raya dilakukan pada tanggal 20-7-2016 pukul 14:12

Wawancara dengan muhammad tonang cawidu ketua Ansor Sulawesi Selatan pada tanggal 4-8-2016 pukul 14:07

Wawancara dengan abdurrahim ketua DPW Wahdah Islamiyah Sulawesi Selatan pada tanggal 9-8-2016 pukul 10:57

Wawancara dengan Muammar Bakry wakil Ketua Forum Komunikasi dan Pencegahan Terorisme (FKPT) pada tanggal 9-8-2016

Wawancara dengan diyauddin aktivis peneliti kajian strategik intelijen indonesia dari Indonesia Intelligence Institute (I3) pada tanggal 8-2016

Internet

Agung Sasongko, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/07/20/oam6cs313-nu-galang-kekuatan-ulama-lawan-radikalisme> diunduh tanggal 21-07-2016 pukul 19:00

Kendi Setiawan, <http://www.muslimoderat.com/2016/05/aktivis-muslim-asean-keberadaan-nu.html> diunduh tanggal 29-7-2016 pukul 21:17

Anom Prihantoro, <http://www.antaranews.com/berita/545323/muhammadiyah-nu-promosikan-demokrasi-nusantara-di-jerman> unduh tanggal 31-07-2016

DAMPAK GREEN TOURISM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TERNATE

Fadhli Kasim
Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA
Arief Wicaksono, S.Ip.,MA

ABSTRACT

The purpose of this study is to Determine how much influence international tourism to revenue-based green tourism and the role of government to develop tourism in the future for improving the economy better. The purpose intended to Achieve, in the writing of this research method is descriptive analysis is the depiction of phenomena and facts that occur will be Examined and then proceed with the analysis of the impacts of green tourism revenue on Ternate.

Based on the research that has been done with the author, discovered the existence of positive and negative impacts the caused by tourism-based development environment, natural or so-called green tourism. The positive impact can be seen in the increasing number of tourists that the Regional Revenue Increase Budget Ternate.

Keywords: Pemda, Green Tourism, PAD

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pariwisata internasional yang berbasis green tourism terhadap pendapatan daerah serta peran pemerintah untuk mengembangkan pariwisatanya di masa depan untuk peningkatan perekonomian yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu penggambaran fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi akan diteliti kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai dampak dari green tourism terhadap pendapatan asli daerah kota Ternate.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, ditemukan adanya dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan, alam, atau yang disebut green tourism. Adapun dampak positif dapat dilihat pada bertambahnya jumlah wisatawan yang mengakibatkan bertambahnya anggaran pendapatan daerah kota Ternate

Kata Kunci: Pemda, Green Tourism, PAD

PENDAHULUAN

Perubahan mendasar yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar Negara. Globalisasi dalam hal ini menggerakkan perdagangan bebas antar benua, perpindahan manusia, barang dan modal yang semakin leluasa, serta pemakaian sumber daya diseluruh dunia menuju efisiensi yang lebih tinggi. Salahsatu penyebabnya adalah kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang semakin memudahkan manusia. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world) yang seolah-olah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia.

Fadhli Kasim

Pengaruh globalisasi dewasa ini memberikan dampak terhadap pola pengembangan interaksi secara bebas atau yang dikenal dengan istilah interaksi transnasional menurut Nye dan Koehone adalah sebagai pergerakan berbagai hal yang secara kasat mata maupun tidak, menembus tapal batas Negara, dimana sekurang-kurangnya salah satu aktornya tidak mewakili suatu organisasi pemerintah atau antar pemerintah. Sejalan dengan proses globalisasi tersebut, para pelaku hubungan internasional juga meluas, tidak hanya melingkup Negara (state actor) saja, namun meluas pada aktor-aktor selain Negara (non-state actor) seperti organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan World Tourism Organization (WTO), LSM, Perusahaan Multinasional (MNC'S), daerah, kelompok-kelompok minoritas, bahkan individu.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah sekarang ini daerah membutuhkan kemampuan dalam memberdayakan potensi dan karakter lokal yang mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional. Sesuai perkembangan yang ada maka pemenuhan akan kebutuhan pelayanan pun akan meningkat yang mengakibatkan banyak pergeseran sosial, ekonomi dan kebudayaan.²⁸

Pergeseran secara sosial ini nampak dari masyarakat agraris atau pertanian ke industri yang biasanya menggantungkan hidupnya dari produksi pertanian ke jasa atau tenaga kerja pabrik, pengangkutan dan lainnya. Penting bagi suatu daerah maupun negara bagaimana bisa memanfaatkan perubahan dan kecenderungan sosial ini yang positif berupa aktifitas jasa seperti kegiatan jasa pariwisata.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pembagian urusan pemerintahan) telah membawa dimensi baru bagi kehidupan Hubungan Luar Negeri. Pada dasarnya pelaksanaan Politik Luar Negeri merupakan kewenangan Pemerintahan Pusat. Namun seiring dengan berlakunya merupakan UU Otonomi daerah tersebut, kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh Pemerintah Pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Merujuk pada dasar hukum tersebut, maka salah satu sektor yang menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah yaitu pariwisata.

Penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Indonesia dituntut untuk mampu mengadaptasikan diri terhadap perkembangan lingkungan, baik pada skala nasional, regional dan internasional, yaitu dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan iptek. Sektor pariwisata telah menjadi aktivitas sosial ekonomi dewasa ini, bahkan disebut-sebut sebagai "industri terbesar sejak akhir Abad 20" yang juga menyangkut "pergerakan barang dan jasa dan manusia dalam skala besar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia". Sejak beberapa dasawarsa terakhir, pariwisata memang telah terbukti menjadi industri terbesar di berbagai belahan dunia.

Kegiatan pariwisata memiliki sifat yang berbeda dengan kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya seperti pertanian dan yang melakukan ekstraksi dan eksploitasi sumber daya seperti industri. Pariwisata memerlukan pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang berada disuatu wilayah. Dalam pariwisata, yang dijual adalah keindahan objek dan kenyamanan pelayanan sehingga kelestarian objek harus dipertahankan dan kemaslahatan masyarakat setempat harus diutamakan. Artinya, pariwisata memiliki fungsi menjaga dan melestarikan budaya dan sumber daya sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Di samping itu, adanya otonomi daerah memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah lebih memiliki peran dan wewenang dalam mengatur dirinya sehingga mobilitas mereka ke luar daerah dalam rangka koordinasi, studi banding, pelatihan dan belajar, maupun rekreasi semakin meningkat. Maka dari itu pemerintah daerah mulai terbuka melihat potensi ekonomi maupun perannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendorong investasi masuk dan mobilitas masyarakat daerah.

²⁸Janes Wolter, *Perdagangan Internasional, Kekuasaan Politik Internasional dan Tatanan Dunia*. Jakarta, Gramedia, 2003, hal. 466

Menghadapi tantangan dan peluang ini, telah dilakukan pula perubahan peran Pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata yang pada masa lalu berperan sebagai pelaksana pembangunan, saat ini lebih difokuskan hanya kepada tugas-tugas pemerintahan terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh swasta dapat berkembang lebih pesat. Peran fasilitator disini dapat diartikan sebagai menciptakan iklim yang nyaman agar para pelaku kegiatan kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara efisien dan efektif. Selain itu sub sektor pariwisata pun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi rakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan (Green Tourism).

Green Tourism mendorong keberlanjutan melalui proses selektif dalam pengembangan program pemasaran untuk menarik wisatawan yang sadar lingkungan, menunjukkan sikap respek terhadap komponen alam, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan sensitifitas budaya lokal yang dianggap sebagai model wisata yang paling baik dalam menyelamatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi variasi kebutuhan baik sekarang maupun untuk generasi masa mendatang.²⁹

Green Tourism itu beragam seperti desa wisata, agrowisata, guest house green, green hotel, wisata alam dan sejenisnya adalah model yang paling ideal bagi sebuah berkelanjutan pariwisata dalam menciptakan tatanan ekonomi baru. Sebagai bentuk wisata alternatif, green tourism memiliki fokus pada pertimbangan kapasitas, edukasi, pelestarian sumber daya lingkungan dan pembangunan daerah, dan kegiatan khas daerah. Sebuah destinasi layak disebut sebagai green tourism jika memiliki empat dimensi utama, yaitu basis alam, dukungan konservasi, keberkelanjutan dan pendidikan lingkungan.³⁰ Terlebih pada daerah yang memiliki potensi wisata alam, khususnya pada daerah kepulauan, sehingga tidak salah jika konsep green tourism didorong oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.³¹

Dalam jangka panjang tujuan pembangunan kepariwisataan nasional dari aspek sosial ekonomi, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Perluasan kesempatan kerja, bertambahnya pendapatan pemerintah dan turut mendorong pembangunan di daerah. Selain itu aspek sosial budaya dapat memperkokoh kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, membina tradisi dan peninggalan sejarah, merangsang peningkatan kecerdasan bangsa dan mendorong kreasi dan cipta yang baik. Hal ini lebih tegas dimuat dalam UU No. 10 Tahun 2009, Pasal 8 ayat 1 tentang Pembangunan Kepariwisata, yang disebutkan bahwa:

²⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35031/5/Chapter%20I.pdf.html>. diakses tanggal 04 Februari 2016

³⁰<http://id.wikisource.org>. UU RI No. 2 Tahun 2015.html. diakses tanggal 25 September 2015

³¹<http://blogspot.com>. Collection of Tourism Expenditure Statistics. World Tourism Organization. 1995, html. diakses tanggal 25 September 2015

Fadhli Kasim

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Pariwisata di era otonomi berperan penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan wilayah, terutama wilayah terpencil yang memiliki potensi alam dan budaya yang unik. Kecenderungan meningkatnya minat daerah dalam pengembangan kegiatan pariwisata memerlukan perhatian dan penanganan yang seksama. Prakarsa dan inisiatif daerah dari pembangunan dimasa otonomi ini sangat penting bagi konsolidasi strategi nasional dalam pengembangan pariwisata.³²

Salah satu daerah tujuan wisata di Maluku Utara yang memiliki keunikan budaya dengan daya tarik panorama alam yang memukau adalah daerah Kota Ternate, di mana hampir setiap tahunnya wisatawan domestik maupun asing yang masuk ke Kota Ternate selalu menyempatkan dirinya untuk menikmatinya. Dengan demikian Kota Ternate semakin berperan dan berfungsi sebagai daerah tujuan domestik maupun asing, yang mana di Kota Ternate itu sendiri akan terjadi arus lalu lintas budaya antar suku bangsa dalam negeri, juga antar bangsa yaitu diluar Indonesia.

Seiring dengan penjelasan diatas, dikalangan masyarakat umum ada anggapan atau asumsi bahwa pariwisata merupakan sumber dari beberapa ketimpangan dalam masyarakat, seperti merosotnya moral, meningkatnya kriminalitas, tingkah laku yang menyimpang, dan lain-lain. Memang benar pariwisata tidak dapat dituding sebagai satu-satunya penyebab tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat. Oleh karena masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan tingkah laku dalam masyarakat seperti misalnya, perkembangan ilmu dan teknologi, komunikasi, pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya pariwisata itu sendiri.³³

Tetapi apabila pariwisata itu dikelola dengan baik, organisasi yang bagus serta kesiapan masyarakat, peran serta instansi terkait atau swasta maka pariwisata justru membawa manfaat besar. Seperti yang kita lihat sekarang ini perkembangan pariwisata di Kota Ternate dengan meningkatnya arus wisatawan yang diikuti meningkatnya alat transportasi, biro perjalanan, kesibukan-kesibukan baik pemerintah maupun swasta yang ada kaitannya dengan pariwisata, seperti penyediaan sarana dan prasarana dalam hal ini sarana akomodasi, perbaikan jalan ke objek wisata yang tadinya sukar dilalui para wisatawan, industri kerajinan yang mulai bermunculan dimasyarakat. Tentunya masih banyak usaha/kegiatan yang dilakukan yang kesemuanya ini adalah merupakan usaha pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan dan dari padanya pemerintah bersama masyarakat setempat mendapat keuntungan.

Menyadari akan kedudukan Maluku Utara khususnya di Kota Ternate sebagai salah satu daerah tujuan yang cukup penting di Indonesia Timur, maka perlu adanya penanganan dalam pembinaan dan pengelolaan yang lebih intensif. Terutama dalam masalah organisasi dan aksesibilitas sehingga ada harapan yang lebih memungkinkan untuk pengembangan pariwisata yang lebih produktif dan berhasil, guna dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata.³⁴ Pemerintah daerah sebagai aktor hubungan internasional membuat berbagai kebijakan diantaranya, kerja sama di pihak BUMN dan UNESCO, fokus dari kebijakan tersebut tidak lain adalah pengembangan pariwisata berbasis Green Tourism. Dimana hasilnya nanti dapat membawa dampak positif terhadap adanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan daerah dan memperkenalkan alam dan budaya Indonesia. Manfaat lain dengan adanya kepariwisataan di Kota Ternate adalah meningkatnya pembangunan fisik sarana dan prasarana walaupun dari segi kuantitasnya belum maksimal. Tetapi apabila dibandingkan sebelum menjadi daerah tujuan wisata, maka kemajuan dalam proses pembangunan jauh lebih meningkat.

³² Dowling, R., & Fennell, D, Kebijakan Ekowisata dan Perencanaan, Cambridge, CABI Publishing, 2003, hal. 194

³³ Muljadi, A.J., Kepariwisata dan Perjalanan (Lamp. UU tentang Pembangunan Kepariwisata), Jakarta, Rajawali Pers 2010, hal. 205

³⁴ Amas Dinsie dan Rinto Thalib, Ternate; Sejarah, Kebudayaan & Pembangunan Perdamaian Maluku Utara, Ternate, Lembaga Rakyat Moloku Kie Raha, 2008, hal.33

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitik dimana peneliti menggambarkan Menyadari akan kedudukan Maluku Utara khususnya di Kota Ternate sebagai salah satu daerah tujuan yang cukup penting di Indonesia Timur, maka perlu adanya penanganan dalam pembinaan dan pengelolaan yang lebih intensif. Terutama dalam masalah organisasi dan aksesibilitas sehingga ada harapan yang lebih memungkinkan untuk pengembangan pariwisata yang lebih produktif dan berhasil, guna dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata. Pemerintah daerah sebagai aktor hubungan internasional membuat berbagai kebijakan diantaranya, kerja sama di pihak BUMN dan UNESCO, fokus dari kebijakan tersebut tidak lain adalah pengembangan pariwisata berbasis Green Tourism. Data yang di gunakan adalah Data Sekunder yaitu data yang berasal dari pengumpulan data melalui penelusuran dari berbagai sumber literature yaitu jurnal, buku, dan olahan hasil penelitian terdahulu yang di kumpulkan melalui Library Reserch yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah data yang terkait dengan isu Korean Wave khususnya K-Pop. Untuk menganalisa data, teknik yang di gunakan yaitu analisa data Kualitatif yaitu analisa data yang di tekankan pada data-data non-matematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat dan pembangunan wilayah, terutama wilayah terpencil yang memiliki potensi alam dan budaya yang unik, dan hal ini yang kemudian perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Fenomena ini juga menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat daerah dalam melakukan perjalanan kegiatan pariwisata sangat berperan penting terbukti dengan meningkatnya kegiatan perencanaan dan pengembangan pariwisata daerah di era otonomi. Pemerintah daerah mulai terbuka melihat potensi ekonomi maupun perannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendorong investasi masuk, dan mobilitas masyarakat daerah.

Kecenderungan pengembangan kegiatan pariwisata daerah meningkat, seiring dengan Prakarsa dan inisiatif daerah dalam membangun dirinya di masa otonomi ini, disebabkan karena pengembangan pariwisata daerah sejalan dengan strategi nasional tentang pengembangan pariwisata di tahun 2020. Dengan demikian manfaat pariwisata itu akan membawa suatu rangkaian kegiatan oleh pemerintah bersama masyarakat. Disamping itu juga pariwisata sebagai salah satu sektor berpotensi mendatangkan keuntungan terhadap daerah untuk pendanaan pembangunan, apalagi setelah diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2015 tentang otonomi daerah, setiap daerah untuk memaksimalkan setiap sumber dayanya.³⁵ Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, dalam hal pengembangan kepariwisataan sebagai suatu sektor pembangunan Kota Ternate, maka penulis akan membahas lebih dalam tentang dampak green tourism terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate tersebut.

A. Peran pemerintah Kota Ternate dalam pengembangan pariwisata yang berbasis green tourism di Kota Ternate

1. Strategi Pengembangan

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah kota ternate, pengembangan sektor pariwisata perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta pariwisata perlu mengembangkan paket-paket wisata baru seperti argowisata atau ekowisata.

Fadhli Kasim

Jenis wisata semacam ini selain tidak membutuhkan modal yang besar juga dapat berpengaruh langsung bagi masyarakat sekitar, masyarakat dapat diikutsertakan dan keuntungan yang diperoleh pun dapat dirasakan oleh masyarakat wilayahnya. Pengembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu ditetapkan beberapa peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata bukan berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu perlu diambil tindakan yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.
2. Pengelola pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat, hal ini penting karena pengalaman pada beberapa daerah tujuan wisata (DTW), sama sekali tidak melibatkan masyarakat setempat, akibatnya tidak ada sumbangsi ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar.
3. Kegiatan promosi yang dilakukan harus beragam, selain dengan mencanangkan cara kampanye dan program Visit Indonesian Year seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kegiatan promosi juga perlu dilakukan dengan membentuk sistem informasi yang handal dan membangun kerja sama yang baik dengan pusat-pusat informasi pariwisata pada negara-negara lain, terutama negara-negara yang potensial.
4. Perlu menentukan DTW-DTW utama yang memiliki keunikan dibanding dengan DTW lain, terutama yang bersifat tradisional dan alami atau Green Tourism. Disebabkan karena objek wisata yang bersifat Green Tourism menjadi sasaran utama para wisatawan asing. Pemerintah pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dan pemerintah daerah setempat, dengan sistem yang jujur, terbuka dan adil. Kerja sama ini penting untuk lancarnya pengelolaan secara profesional dengan mutu pelayanan yang memadai. Selain itu kerjasama diantara penyelenggara juga perlu dibangun kerjasama diantara agen Biro perjalanan penyelenggara tempat wisata, pengusaha jasa akomodasi dan komponen-komponen terkait lainnya merupakan hal yang sangat penting bagi keamanan, kelancaran dan kesuksesan pariwisata.
5. Perlu dilakukan pemerataan arus wisatawan bagi semua DTW yang ada di seluruh Indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga harus memberikan perhatian yang sama kepada semua DTW perhatian DTW yang sudah mandiri hendaknya dikurangi dan memberikan perhatian yang lebih terhadap DTW yang memerlukan perhatian lebih.
6. Mengajak masyarakat sekitar DTW agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memasarkan produk-produk lokal serta membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengadaan modal bagi usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan.
7. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran pariwisata. Pengadaan dan perbaikan jalan, telepon angkutan, pusat perbelanjaan wisata dan fasilitas lain di sekitar lokasi DTW sangat diperlukan.
8. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran pariwisata. Pengadaan dan perbaikan jalan, telepon angkutan, pusat perbelanjaan wisata dan fasilitas lain di sekitar lokasi DTW sangat diperlukan.

³⁵Baiquni M, I Putu Anom dkk, *Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global* : Denpasar Udayana University Press, 2010, hal. 56

Dampak Green Tourism Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate

Dengan memperhatikan beberapa masukan ini kiranya dapat membantu bagi penyelenggara pariwisata yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Tentunya saran-saran dan masukan tersebut tidak berlaku untuk semua DTW, hal ini sangat tergantung pada kebutuhan DTW masing-masing yang memiliki permasalahannya sendiri dari waktu ke waktu dan lingkungan yang berbeda-beda. Kota Ternate sebagai daerah kepulauan yang memiliki beragam jenis pariwisata potensial baik secara budaya, History, sosial, serta alam atau lingkungan. Obyek wisata seperti ini perlu dikembangkan agar dapat memberikan keuntungan kepada pemerintah dan masyarakat. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate, bahwa :

Kota Ternate memiliki sejumlah potensi alam untuk dikembangkan menjadi satu objek yang menarik bagi wisatawan mancanegara, selain itu situs-situs peninggalan Perang Dunia Ke-II yang masih ada di Kota Ternate dan juga tempat-tempat sejarah lainnya. Maka dari itu, ini menjadi suatu keharusan bagi PEMDA untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, Pemda sebagai aktor daerah harus melakukan pembinaan secara terpadu dalam mengembangkan pariwisata di kota ternate sebagaimana yang tertera dalam motto kota ternate itu sendiri "Bahari Berkesan" yang mencakup :

1. Penghasilan utama devisa
2. Profesionalsme SDM
3. Pemeberdayaan ekonomi rakyat
4. Pemberdayaan wisata nusantara
5. Peluhuran seni budaya
6. Pelestarian keindahan alam
7. Keterpaduan daya upaya.
8. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun Tahun 2000 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa dampak pada pergeseran penyelenggaraan pemerintah di daerah dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini tentu saja memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah terutama daerah Kabupaten/Kota dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan di daerahnya dengan tetap berpedoman kepada garis kebijakan yang bersifat nasional.

2. Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Ternate

Sesuai dengan peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Untuk mewujudkan tugas tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. Penyelenggaraan inventarisasi dan pengaturan teradap objek dan daya tarik wisata
- d. Penyelenggaraan pembangunandan pengembangan kepariwisataan.
- e. Pembinaan dan pengembangan kesenian daerah serta pemeliharaan tempat-tempat pariwisata
- f. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

Fadhli Kasim

Dalam pengembangan kepariwisataan, tidak terlepas dari faktor ketersediaannya modal daerah, tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap jenis pengembangan pariwisata, sehingga pada sektor pariwisata pemerintah kota ternate dapat melakukan atau menjalankan model pariwisata yang tidak terlalu menguras dana daerah, maka pemerintah diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam pengembangan pariwisata yang berbasis pada lingkungan atau alam (Green Tourism). Pariwisata sebagai satu sektor penunjang perekonomian daerah kota Ternate dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu pemerintah daerah melakukan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dan terencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh provinsi Maluku Utara/Kota Ternate.

Perencanaan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate tahun 2011-2015 disusun berdasarkan dengan kondisi lingkungan. Hal ini sejalan dengan perkembangan, dokumen perencanaan Kota Ternate berdasarkan pola dasar pembangunan daerah Kota Ternate.³⁶ Rencana strategi merupakan rencana pokok dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate yang berpatokan pada;

1. Tersedianya kebijakan dan Program Strategi dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan kepariwisataan dalam lingkup pemerintah Kota Ternate.
2. Tersedianya rumusan program strategi yang merupakan indikator program APBD dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate, sekaligus sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja.
3. Terwujudnya komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif terhadap program-program pengembangan kepariwisataan yang akan dibiayai melalui APBD Pemerintah Kota Ternate.
4. Mewujudkan Kota Ternate sebagai daerah tujuan wisata (DTW) andalan di provinsi Maluku Utara dengan menciptakan kenyamanan, keindahan, kedamaian, keramahan dan keamanan.
5. Melestarikan seni budaya Maluku Utara pada umumnya dan Kota ternate pada Khususnya yang ada dan yang hampir penuh.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti melalui metode wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ternate bahwa; Kota Ternate memiliki beragam pariwisata yang bisa dijadikan sebagai objek wisata yang berbasis pada lingkungan, Tetapi pengembangan pariwisata kota ternate sampai saat ini masih terfokus pada peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu. Diantaranya adalah benteng-benteng peninggalan Portugis, Belanda, dan Jepang. Adapun jenis pariwisata yang berbasis pada lingkungan atau alam diantaranya adalah pantai sulamadaha, danau tolire, taman nasional, dan beragam lainnya.³⁷

Jenis potensi wisata yang berbasis pada lingkungan yang ada di Kota Ternate sampai saat ini belum dijalankan atau dikelola secara maksimal, disebabkan karena kurang adanya sumberdaya manusia yang memadai dalam pengelolaan objek wisata yang berbasis pada lingkungan.

B. Apa Dampak Yang Dihasilkan Dari Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Green Tourism di Kota Ternate

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kota Ternate. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan keuntungan terhadap daerah atau negara.

³⁶40 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Ternate 2010-2014

³⁷Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), Tahun 2011-2015

Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994 : 14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.³⁹

Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan belanjanya, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (Tourism Final Demand) pasar barang dan jasa. Selanjutnya Final Demand wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (Investment Derived Demand) untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain (Spillane, 1994 : 20) Sejalan dengan hal tersebut dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dikelompokkan oleh Cohen (1984) menjadi delapan kelompok besar, yaitu:

1. dampak terhadap penerimaan devisa
2. dampak terhadap pendapatan masyarakat
3. dampak terhadap kesempatan kerja
4. dampak terhadap harga-harga,
5. dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan,
6. dampak terhadap kepemilikan dan control,
7. dampak terhadap pembangunan pada umumnya dan dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Negara Indonesia terkhususnya Kota Ternate yang memiliki pemandangan alam yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah sendiri. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a) pendapatan asli daerah, yaitu (i) hasil pajak daerah, (ii) hasil retribusi daerah, (iii) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (b) dana perimbangan, (c) pinjaman daerah, (d) lain-lain pendapatan daerah yang asli. Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata.

³⁹Ibid, hal. 3

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Pariwisata di Kota Ternate akan menjadi tempat wisata nasional maupun internasional, jika pengelolaan fasilitas dan publikasi potensi pariwisatanya bisa dikelola dengan baik, sehingga dapat dikenal dan diketahui pada tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Pengembangan objek pariwisata yang berbasis pada lingkungan/green tourism di Kota Ternate belum terealisasi dengan baik, hal ini disebabkan karena konsep pariwisata yang dijalankan oleh pemerintah kota Ternate sejak tahun 2010-2015 masih terfokus pada wisata peninggalan sejarah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.
3. Publikasi yang efektif oleh pemerintah Kota Ternate dan Instansi terkait dapat menarik perhatian para investor untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisatanya, agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, sehingga kesenjangan ekonomi masyarakat dapat teratasi.
4. Jika hal di atas dilakukan secara efisien dan efektif, dapat diprediksikan lima tahun kedepan konsep pengembangan Pariwisata yang berbasis green tourism dikota Ternate akan menjadi salah satu tempat Pariwisata terkenal pada tingkat Nasional maupun Internasional, sehingga dapat dikunjungi oleh para Touris Lokal maupun Asing, yang berujung kepada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku ;

Chilcote H. Ronald, Teori Perbandingan Politik “ Penelusuran Paradigma”, Jakarta, Raja Wali Pers, 2010

Dinsie Amas & Thalib Rinto, Ternate; Sejarah, Kebudayaan & Pembangunan Perdamaian Maluku Utara, Ternate, Lembaga Rakyat Moloku Kie Raha, 2008

Fandeli. Ch, Pengertian dan Kerangka Dasar, Kepariwisata dalam Dasar-dasar manajemen Kepariwisata Alam”, Yogyakarta, Liberty, 1995

Ilmar Aminuddin, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana Prenada Media Grop, 2010

J.A Muljadi, Kepariwisata dan Perjalanan (Lamp. UU tentang Pembangunan Kepariwisata), Jakarta, Rajawali Pers, 2010

Muhamaddun H. Adam, Investasi Asing di Provinsi Maluku Utara dalam Era Otonomi; Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional, Fisip Univ. 45, 2007

Pendit, Ny. S, Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana, Jakarta, PT Pandnya Paramita, 1990

Suharto Joyo, Aspek Ketersediaan dan Tututan Kebutuhan Dalam Pariwisata, Yogyakarta, Liberty, 2000

Saragih. B, Paradigma Baru dalam Pembangunan Berbasis Pertanian,, Jakarta, CV Nasional, 1998

Suyuto. M, “Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban”. Adiya Media, Yogyakarta, 1994

Spilane, JJ, Pariwisata Indonesia, Sejarah dan Prospeknya, Yogyakarta, Kanisius, 1987

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate, Rencana Strategi Satuan kerja perangkat, daerah (RENSTRA SKPD), Tahun 2011-2015

Media Internet;

<https://www.kompas.com> Turis Mancanegara Diprediksi Meningkat 30 Persen, diakses tanggal 20 Januari, 2011

https://www.academia.edu/9872978/Pariwisata_Menjadi_Strategi_Pembangunan_Indonesia.html . diakses tanggal 20 februari 2016

<https://www.kompas.com> Tahun Ini Banyak Turi Asing “Buang Uang di Indonesia”, Kompas. diakses 20 Januari 2016

[http://portalgaruda.org/article.php?article=318216&val=6352&title=GREEN TOURISM.html](http://portalgaruda.org/article.php?article=318216&val=6352&title=GREEN%20TOURISM.html). diakses tanggal 4 februari 2016

<http://madebayu.blogspot.co.id/2009/10/dampak-sosial-pengembangan-pariwisata.html>, diakses tanggal 3 februari 2016

<https://prezi.com/bdscobeqwyob/green-tourism/>, diakses tanggal 4 tahun 2016

Fadhli Kasim

<http://mahasiswapariwisatamp2adyangga.blogspot.co.id/2015/05/dampak-terhadap-perekonomian.html>, diakses tanggal 4 tahun 2016

<http://gajahhit.blogspot.co.id/2014/02/pariwisata-di-indonesia.html>. diakses tanggal 04 februari2016

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35031/5/Chapter%20l.pdf>. diakses tanggal 04 tahun 2016

<http://bataviase.co.id/node/konsep-pariwisata-internasional>,di akses tanggal 2 desember 2015

<http://www.scribd.com/doc-Konsep-Pariwisata-Internasional>,di akses tanggal 25 desember 2015

UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN NELAYAN TRADISIONAL DI PERAIRAN AUSTRALIA

Wa Yanti
Beche Bt. Mamma, S.Ip.,MA
Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah nelayan tradisional di perairan Australia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data yang penulis gunakan dengan mengambil sumber data dari jurnal maupun internet serta artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan kerjasama atau pertemuan dengan Pemerintah Australia guna membahas nasib para nelayan tradisional Indonesia yang mendapatkan masalah di perairan Australia. Pertemuan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan yang terjadi di wilayah perairan tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberi solusi bagi kedua negara.

Permasalahan nelayan tradisional telah menjadi masalah yang rumit diantara kedua negara, para nelayan kerap tak sedikit di tangkap dan diadili oleh otoritas keamanan Australia dengan tuduhan bahwa telah melanggar batas perairan dan mengambil biota laut milik negara Australia. Padahal dalam notakesepahaman yang pernah di sepakti oleh kedua negara, nelayan tradisional Indonesia bebas mengambil hasil laut sesuai perjanjian yang telah ditetapkan yaitu dalam MoU Box 1974. Aturan ini mejadi jalan masuk bagi para nelayan tradisional untuk melintasi perairan Australia. Kata Kunci : Nelayan Tradisional, MOU BOX 1974, Indonesia, Australia

PENDAHULUAN

Penangkapan dan penahanan nelayan tradisional Indonesia di wilayah Perairan Australia telah berkembang menjadi isu yang semakin penting dibicarakan dalam hubungan bilateral kedua negara. Hal ini terlihat dari tiga indikasi yaitu pertama, yaitu isu mengenai nelayan tradisional telah menjadi salah satu agenda pembahasan daslam berbagai kesempatan pertemuan bilateral kedua negara, kesepakatan perjanjian dan kerjasama baik dibidang perikanan atau kelautan dan keamanan. Kedua, keseriusan masalah nelayan tradisional dalam hubungan kedua negara ini ditujukan oleh fakta penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Australia masih terus berlangsung dan dengan kecenderungan yang semakin terjadi. Ketiga, kasus-kasus penangkapan, penahanan dan pembakaran kapal nelayan Indonesia di negara Australia tidak jarang menimbulkan komplikasi dalam hubungan kedua negara.

Dilihat dari sejarah, banyak nelayan-nelayan Indonesia, terutama yang berasal dari timur Indonesia seperti nelayan dari pulau Rote, Flores, Alor, Sabu, Buton, Madura, Timor, Sulawesi dan Maluku sudah turun temurun sejak abad ke-17 yaitu sebelum adanya negara Australia telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan antara Indonesia dan Australia. Para nelayan tersebut telah melaut hingga sekitar perairan selatan Nusa Tenggara Timur.

Dalam pelaksanaannya hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayan-nelayan Indonesia di atas sudah dijamin dalam hukum internasional yaitu konvensi hukum laut PBB yang telah di sahkan pada tanggal 10 Desember 1982 di Teluk Montego, Jamaika melalui pasal 51 dan pasal 62 Ayat 3 UNCLOS (*The United Nation Convention on The Law of The Sea*).³⁸

Pemerintah Indonesia dan Australia juga telah mengakomodasikan kepentingan nelayan-nelayan tradisional tersebut dalam nota kesepakatan, yaitu *Memorandum of Understanding between th Government of the Republic of Indonesia Regarding of Operation of Indonesia Traditional Fishermant in Area of the Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf* pada tahun 1974. MOU ini biasa juga disebut sebagai MOU BOX. Dengan demikian, MOU 1974 ini menjadi landasan hukum bagi nelayan tradisional Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di beberapa zona perikanan eksklusif Australia beserta landas kontinennya. Adapun zona perikanan yang diperjanjikan kedua negara ini adalah meliputi Ashmore Reef, Seringapatam Reef, Cartier Islet, Scott Reef, dan Browns Islet. Artinya di wilayah ini pemerintah Australia tidak akan menerapkan peraturan perikananannya kepada nelayan tradisional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi masalah nelayan tradisional di Perairan Australia serta menganalisis perjanjian MoU Box 1974 dan kebijakan kedua negara terkait persoalan nelayan tradisional, dan hak penangkapan ikan.

Jenis data yang penulis gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, situs web yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penlulis adalah Telaah Pustaka (Library Research) yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik berupa buku-buku, internet dan jurnal. Data yang menyangkut mengenai masalah penanganan permasalahan nelayan tradisional di wilayah perairan Australia. Bahan-bahan tersebut di peroleh dari berbagai tempat, baik dari perpustakaan maupun yang terkait dengan bahan proposal penelitian ini yaitu : Perpustakaan Umum Universitas Bosowa Makassar.

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang di peroleh dari penelitian bersifat analisi Kualitatif. Dalam menganalisis permasalahan di gambarkan berdasarkan fakta-fakta yagn ada dan kemudian menghubungkan fakta satu dengan fakta yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Nelayan Tradisional di Perairan Australia

1. Perbedaan Persepsi Nelayan Tradisional antara Indonesia dan Australia.

Istilah mengenai nelayan tradisional telah menjadi permasalahan antara Indonesia dan Australia. Di karenakan Australia memiliki pandangan berbeda ketika merumuskan istilah "tradisional" bagi nelayan Indonesia. Perbedaan persepsi antara kedua negara ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi nelayan Indonesia. Australia berpendapat bahwa nelayan tradisional diartikan sebagai mereka yang menggunakan semacam sampan dan bukan perahu besar. Pemerintah Australia tidak mengakui nelayan yang menggunakan perahu berukuran besar dan diperlengkapi dengan peralatan modern atau perahu bermesin sebagai nelayan tradisonal.

³⁸ Thontowi Jawahir & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006, Hal. 185

Sedangkan menurut pemerintah Indonesia, nelayan yang sifatnya tradisional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 45 mencari ikan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 Gross Tone (GT). Aturan Undang-Undang ini menjadi point penting dalam menjelaskan pengertian dari nelayan tradisional.

Dalam pandangan Australia, yang disebut dengan nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan perahu serta alat tangkap secara tradisional dalam mencari ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan sekitar Laut Timor dan Pulau Pasir (Ashmore Reef). Menurut H. Muhammad Guntur pihak Australia menafsir sendiri kata tradisional itu dalam MoU Box 1974 kemudian secara sepihak melarang nelayan tradisional Indonesia untuk mencari ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan Laut Timor dan Pulau Pasir yang sudah di nyatakan sebagai cagar alam Australia.

Didalam perjanjian MOU BOX 1974, kriteria nelayan tradisional hanya dilihat dari tingkat teknologi yang digunakan, yaitu nelayan dengan perahu kecil, tanpa motor dengan peralatan yang sederhana. Mou Box ini tidak saja membatasi daerah operasi nelayan tradisional, tetapi juga membatasi teknologi waktu (technological time warp). Dalam MoU tersebut di nyatakan bahwa, hanya nelayan tradisional yang di izinkan untuk memasuki area MoU. Nelayan tradisional di artikan sebagai individu, yaitu yang secara tradisional telah menangkap ikan dengna metode yang telah menjadi tradisi selama beberapa dekade. Dengan kata lain, yang dipergunakan untuk menentukan "tradisional" dan "hak untuk masuk" adalah metode yang dipergunakan oleh sang nelayan, bukan kenyataan bahwa mereka telah ada di daerah tersebut dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, hanya para nelayan yang berlayar dengan menggunakan perahu yang diperbolehkan menurut MOU.

2. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Nelayan Indonesia di Perairan Australia

Terdapat tiga jenis nelayan pelintas batas yang kerap melakukan penangkapan ikan di wilayah Australia, pertama nelayan yang sudah turun-temurun menangkap ikan yaitu nelayan yang terikat dalam perjanjian MoU Box 1974, kedua nelayan yang terbawa arus hingga melintasi batas perairan Australia disebabkan oleh buruknya cuaca(faktor alam), ketiga nelayan yang tidak terikat dalam perjanjian tetapi melakukan aktivitas penangkapan ikan misalnya nelayan yang berasal dari daerah lain yang tidak diperjanjikan dalam aturan Mou Box.

Terhadap nelayan yang sengaja mengambil ikan di perairan Australia, akan dikenakan sanksi berupa penyitaan kapal, pembakaran kapal, dan pemenjaraan para nelayan maksimal 3 tahun penjara kemudian membayar denda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Australia. Penyitaan dan penyitaan kapal ini dilakukan atas tuduhan penangkapan biota laut yang dilindungi oleh pemerintah Australia. Pihak Australiapun tak segan mengadili para nelayan ketika diketahui telah melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu banyak nelayan atau nelayan tradisional dari Indonesia ditangkap dan dieksekusi di pengadilan Broome, Australia. Tak jarang dari mereka bisa memperoleh pembebasan ketika ditangkap oleh otoritas keamanan Australia. Walaupun ada sebagian dari mereka yang merupakan nelayan tradisional asal NTT yaitu nelayan yang terikat dalam aturan MoU Box, tetap saja pihak Australia menyamakan mereka dengan nelayan lainnya yang melakukan tindak illegal pencurian ikan.

Para nelayan tradisional yang sering berlayar di Perairan Australia kerap dituduh sebagai pelaku kejahatan pencurian ikan. Mereka selalu ditahan dan diproses di pengadilan tanpa alasan yang jelas. Menurut salah seorang nelayan asal Namosain Kupan, Abdul Wahab Sidin (47) mengatakan bahwa sudah dua kali mereka di tangkap oleh pihak Australia saat tengah mencari ikan di wilayah perairan laut Timor, beberapa tahun lau. Perahu mereka digiring masuk kewilayah perairan Australia sebagai dasar tuduhan bahwa mereka telah memasuki wilayah perairan Australia secara illegal, padahal posisi mereka masih diwilayah perairan Indonesia berdasarkan rekaman GPS (Global Positioning System).

Lanjut, terkait dengan hasil rekaman GPS (Sistem penentuan lokasi berdasarkan sinyal satelit untuk menghasilkan informasi berupa titik koordinat dan posisi dalam peta perairan), Australia selalu tidak pernah menggubrisnya. Ketika para awak nelayan di evakuasi ke kapal-kapal patroli Australia, perahu-perahu itu akhirnya di musnahkan dengan cara membakar serta menembaknya sampai tenggelam ke dasar laut.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia menurut Songa Wilhemus Wetan (2000) yaitu, pengertian nelayan terhadap MOU Box maupun Agreed Minutes 1989 masih kurang. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang masih relatif rendah, sehingga sangat besar kemungkinan mereka tidak dapat membaca peta dan karenanya tidak dapat mengenali dengan tepat wilayah operasinya. Hal ini karena, selain para nelayan tradisional tidak dapat mengerti atau membaca peta, tetapi juga karena tidak terdapat tanda-tanda sebagaimana yang di maksudkan oleh MOU Box atau Agreed Minutes.

3. Kasus Penangkapan dan Pembakaran Kapal oleh Nelayan Tradisional Indonesia

Sejak ditandatanganinya nota kesepahaman MoU Box tahun 1974 banyak terjadi kasus penangkapan dan pembakaran kapal yang dilakukan oleh otoritas keamanan laut Australia. Pihak Australia menilai kegiatan penangkapan yang dilakukan para nelayan sudah menyalahi aturan tentang kebebasan menangkap ikan di perairan Australia (Australia Fishing Zone) dan sengaja melintasi batas kedaulatan Australia. Sehingga mendorong Australia untuk memerangi para nelayan tersebut dengan membakar dan menenggelamkan kapal-kapal atau perahu pelintas batas.

Pada awal tahun 2000 -2006 nelayan yang melintasi batas secara ilegal ke perairan Australia semakin meningkat, hingga mencapai 2.500 orang. Maka mulailah dilakukan kegiatan kampanye, sehingga mengalami penurunan pada tahun 2007 yang hanya berjumlah 357 orang.

Pada April 2008, Konsulat RI Darwin sempat mencatat setidaknya ada 253 nelayan Indonesia yang tahan otoritas Australia di Pusat Penahanan Darwin. Mereka umumnya adalah para nelayan asal Sulawesi Selatan yang merupakan awak dari 33 Unit kapal ikan. Lanjut tidak semua nelayan Indonesia yang ditangkap dan kemudian kapalnya dihancurkan otoritas keamanan Australia adalah mereka yang tertangkap tangan saat menangkap ikan di perairan negara tetangga ini. Adakalanya mereka di tangkap kapal-kapal patroli Australia saat mereka masih berada di Perairan Indonesia.

Kemudian pada Oktober 2013, tiga perahu nelayan Indonesia yang ditangkap pihak Bea Cukai dan Angkatan Laut Australia, dimusnahkan di Kota Darwin, Northern Territory. Pemusnahan ketiga perahu itu dilakukan dengan cara dibakar. Menurut Radio Australia ABC, sejak Juli lalu, sudah empat perahu nelayan asal Indonesia yang dimusnahkan di Australia, dan para awak kapalnya ditahan untuk diproses hukum lebih lanjut. John Marrington dari Otoritas Pengelola Perikanan Australia mengatakan perahu-perahu tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar, karena mengancam lingkungan serta tidak layak berlayar. Pada kasus penurunan ini disebabkan oleh dikeluarkannya kebijakan Sovereign Border yang diluncurkan oleh Tony Abbot sejak ia terpilih sebagai Perdana Menteri Australia tahun 2013.

Walaupun pihak Australia telah mengeluarkan kebijakan dalam mengurangi kasus pencurian ikan, tetapi pada kenyataannya proteksi yang dilakukan oleh pemerintah Australia tidak mampu secara efektif menghentikan nelayan-nelayan Indonesia yang melaut memasuki perairan tersebut. Hasilnya pada 16-26 Mei 2014 pihak berwenang Australia kembali menahan 53 Nelayan Indonesia karena dituduh mencuri ikan di Perairan Utara Australia.

³⁸ Thontowi Jawahir & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006, Hal. 185

Dan sampai sekarang ini, kasus penangkapanpun kembali berlanjut lewat pesawat pengintai MBC yang sengaja melihat kapal para nelayan didekat pulau Browse, sekitar 280 Mil dari Timur Laut Broome, Australia Barat. Mereka menangkap sekiranya 8 nelayan Indonesia yang diduga illegal tengah membawa siput laut.

Menurut mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia yang juga pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mencatat bahwa dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir (2005-2014), sudah tercatat 2.500 lebih perahu nelayan tradisional Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dimusnahkan oleh Australia tanpa ada dasar hukum yang jelas. Menurutnya “para nelayan kita diproses secara hukum oleh pengadilan Negeri Kanguru, dan menjalani hukuman atas tuduhan mencuri ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan Australia secara illegal”.³⁹

Tuduhan otoritas pengamanan wilayah perairan Australia terhadap nelayan Indonesia itu, tidak selamanya dikabulkan oleh Pengadilan Federal Darwin, Australia Utara, seperti dalam kasus yang dialami oleh salah seorang nelayan asal Kupang pada Juni 2014. Pengadilan Federal menolak semua tuduhan yang disampaikan otoritas pengamanan wialayah perairan Australia, karena unsur hukumnya tidak terbukti. Pengadilan kemudian memerintahkan Pemerintah Australia untuk membayar ganti rugi kepada nelayan asal Kupang itu sebesar 60 ribudollar Australia atau sekitar Rp. 660 juta.⁴⁰

B. Upaya Indonesia dalam Mengatasi Masalah Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia

Hukum internasional yang tertuang dalam Pasal-pasal UNCLOS 1982 dan nota kesepahaman RI-Australia (MOU Box) 1974 telah memberikan jaminan hukum terhadap nelayan-nelayan tradisional Indonesia menangkap ikan di perairan Australia. Namun, realitasnya penangkapan, penahanan, dan pembakaran kapal serta alat tangkap mereka oleh aparat Australia terhadap nelayan Indonesia terus saja terjadi hingga saat ini. Nelayan tradisional tersebut masih menghadapi hambatan dalam melaksanakan hak perikanan tradisional mereka secara optimal sebagai akibat adanya perkembangan yang terjadi baik pada kondisi mereka dalam hal penangkapan ikan dan juga pada ketentuan di kawasan MoU Box oleh pihak Australia.

Terkait dengan tindakan Australia terhadap nelayan-nelayan tradisional di atas, Pemerintah Indonesia sejauh ini telah mengupayakan ragam cara memberikan perlindungan terhadap mereka. Salah satunya adalah membangun kerjasama bilateral dengan Australia. Dalam hal ini, pemerintah kedua negara telah menyetujui berbagai kerjasama yang sifatnya praktis.

1. MoU Box - Vessel and Fisher Identification Activity

Pada tanggal 7 November 2013, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Australia sepakat melaksanakan kegiatan yang dinamakan “Mou Box – Vessel and Fisher Identification Activity”. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi persoalan nelayan tradisional Indonesia di Australia. Skema yang dikembangkan meliputi empat komponen utama yaitu :

- a) Identifikasi kapan dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan.
- b) Pencacatan hasil tangkap ikan dan hasil yang didaratkan
- c) Penggunaan alat keselamatan di laut
- d) Pembentukan kerangka kerja kelembagaan

Kegiatan ini meluncurkan program kartu nelayan yang melibatkan 50 perahu dan 400 nelayan dari Kabupaten Rote, Ndao. Identifikasi dan registrasi ini penting dilakukan sebagai bagian upaya untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang sesungguhnya tidak memiliki hak

³⁹Tragedi Nelayan Tradisional Indonesia” dalam <http://kupang.tribunnews.com/2009/07/19/tragedi-nelayan-tradisional-indonesia> di akses pada tanggal 02 Agustus 2017, jam 02.12 WITA

⁴⁰Kisah Perahu-perahu Nelayan yang Dibakar oleh Australia” dalam <http://kupang.tribunnews.com/2014/12/18/kisah-kisah-perahu-nelayan-yang-dibakar-oleh-australia> di akses pada tanggal 03 Agustus 2017, jam 22.11 WITA

untuk menangkap ikan di wilayah MoU Box. Sebab aturan MoU Box hanya diperuntukan bagi nelayan tradisional yang sudah turun-temurun menangkap ikan di perairan Australia. Identifikasi ini juga memudahkan pihak pemerintah Australia untuk mengetahui bahwa para nelayan tradisional yang berlayar ini merupakan nelayan yang berasal dari Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini melibatkan LSM The Nature Conservancy (TNC) dan Arafura and Timor Seas Ecosystem (ATSEA), melalui pelaksanaan kegiatan Public Sector Linkage (PSL) yang merupakan program Pemerintah Australia untuk mendukung pengelolaan perikanan.

Direktorat PUPJPT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia Lilie Soeprijadi dalam menyampaikan sambutannya bahwa melalui kegiatan PSPL Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia sudah bersepakat melaksanakan kegiatan MoU Vessel and Fisher Identification Activity yang bertujuan untuk mengembangkan skema pencacatan hasil tangkapan, dan pendanaan kapal serta pemberian kartu pengenalan kepada para nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di wilayah MoU Box.

Menurut Jim Prescott, pemimpin AFMA mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah merupakan kerjasama regional antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dengan dukungan dari GEF/UNDP, yang memberikan perhatian khusus pada kelestarian sumber daya lingkungan dan perairan laut Arafura dan Timor. Kegiatan ini juga sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan pembangunan dimana Pemerintah Kab. Rote Ndao juga mengatakan sebagai pengharapan karena nelayan saat ini berada pada garis kemiskinan dan sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah Indonesia maupun Australia.⁴¹

Dengan adanya kegiatan ini dapat membawa perubahan terhadap kehidupan nelayan, bagaimana nelayan bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pertemuan tersebut delegasi AFMA maupun pemerintah Kab. Rote Ndao sama-sama berdiskusi tentang pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang tentunya akan berguna bagi masyarakat nelayan kedepannya. Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Rote ini tujuannya bukan saja mengidentifikasi para nelayan tetapi juga pemerintah setempat berupaya memproteksi, melindungi para nelayan khususnya nelayan dari pulau Rote untuk lebih berhati-hati dalam melaut. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan alat keselamatan di laut. Diketahui bahwa peralatan untuk keamanan nelayan sangat dibutuhkan.

2. Pertemuan Indonesia dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA)

Sebelumnya, pada tahun 2013 perwakilan dari pemerintah Australia, Australian Fisheries Management Authority (AFMA) Mr. Jimm Prescott berkunjung ke Kabupaten Rote, Ndao guna membahas kembali kesepakatan MoU Box.⁴² Dalam pertemuan ini, kedatangan mereka karena lantaran pemerintahnya mengerti dengan kehidupan nelayan. Diharapkan dari kesepakatan ini nanti akan dapat memaksimalkan pendapatan para nelayan.

Pertemuan tersebut juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yaitu Bupati Haning untuk berusaha memperjuangkan hak-hak nelayan tradisional dan mengedepankan kepentingan nelayan agar para nelayan tradisional bisa menangkap ikan di wilayah pulau pasir dan lainnya. Dan memberi pengetahuan terhadap nelayan agar tidak lagi melanggar batas-batas wilayah dan kesepakatan yang sudah disepakati dalam MoU Box. Dalam kunjungan pemerintah Australia ke Kab. Rote Ndao, pemerintah Kabupaten yang didukung oleh DPR RI akan mengawasi dan menindaklanjuti terhadap berbagai langkah yang dilakukan oleh pemkab setempat dalam mengatasi persoalan nelayan tradisional.

⁴¹ PSLP Adakan Workshop MOU BOX di Rote” dalam <http://www.moral-politik.com/2013/11/jim-prescott-perlunya-kelestarian-sumberdaya-dan-lingkungan/di-akses-pada-tanggal-05-September-2017,jam-00.12-WITA>

⁴² Jimm Prescott : Perlunya Kelestarian Sumberdaya dan Lingkungan” dalam <http://www.moral-politik.com/2013/11/pslp-adakan-workshop-mou-box-di-rote/diakses-pada-tanggal-06-September-2017,jam-00.12-WITA>

Harapannya dari pertemuan tersebut dapat menguntungkan para nelayan. Pasalnya, setiap nelayan yang menangkap ikan di dekat Australia selalu mendapatkan masalah hingga terjadi penangkapan nelayan. Bahkan nelayan yang di tangkap ada yang tiga hari, lima hari, bahkan dalam waktu beberapa bulan sehingga terpaksa harus meninggalkan keluarga.

Kesepakatan MOU Box merupakan perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk duduk bersama dalam mengatur kegiatan nelayan tradisional Indonesia yang beroperasi di wilayah perairan Australia. Pengaturan tersebut bertujuan agar dapat menjamin kelangsungan hak-hak perikanan tradisional (Traditional Fishing Right) para nelayan.

Persoalan ini sangat membutuhkan peran yang intensif dari pemerintah daerah maupun pusat dalam mencari jalan terbaik. Pemerintah harus berusaha mengambil kebijakan efektif yang dapat menjamin hak-hak nelayan untuk menangkap ikan di perairan Australia. Diketahui bahwa hampir sebagian mayoritas penduduk Rote berprofesi sebagai nelayan, mereka hanya menggantungkan hidupnya untuk mencari ikan di laut.

Ada beberapa faktor penyebab sehingga para nelayan terus menerus melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Australia, yaitu :

- a) Tuntutan Tradisi
- b) Pasar Internasional sumber daya laut
- c) Tekanan sumber daya di perairan nasional akibat meledaknya sumur minyak lontara, kasus ini menjadi penghambat pendapatan para nelayan.

3. Kerjasama Pertukaran Data Pengawasan.

Pemerintah Indonesia dan Australia pada akhir 2015 telah melakukan kerjasama dalam pertukaran data pengawasan di wilayah kedua negara. Adapun kerjasama yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember bertempat di ruang rapat Hiu Macan 001, Gedung Mina Bahari III Lt. 15 oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanuddin bersama Michael Noonan, Commander Maritime Border Command, Operation Group, Australian Border Force.⁴³ ialah untuk melakukan kordinasi patroli, pertukaran informasi, pendidikan dan pelatihan serta pengawasan monitoring bersama.

Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan dalam kerangka kerjasama ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pelaksanaan forum IAFSF. Selain itu kerjasama antara Indonesia dan Australia perlu diperkuat terus menerus berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing pihak.

Meskipun ada niatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah nelayan tradisional tersebut diatas, pemerintah sejauh ini daspat dikatakan belum memperlihatkan upaya maksimal di dalam memberikan perlindungan terhadap mereka. Hal ini antara lain terlihat dari indikasi perhatian pemerintah terhadap perlindungan warga negara, khususnya nelayan tradisional yang belum memadai.

⁴³"Ditjen PSDKP dan Australia Border Force Sepakati Kerja Sama Pertukaran Data Pengawasan" dalam <http://news.kkp.go.id/index.php/ditjen-psdkp-dan-australian-border-force-sepakat-kerja-sama-pertukaran-data-pengawasan/> di akses pada tanggal 27 Juli, Jam 20.54 WITA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Mansbach W. Richard dan Rafferty L. Kirsten, 2012, Pengantar Politik Global : Introduction to Global Politics, Bandung, Nusa Media

Rudy T. May, 2002, Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang dingin, Bandung, PT Refika Aditama

Sodik M Didik, 2014, Hukum Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung, PT Refika Mediatama

Thontowi Jawahir & Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, PT Refika Aditama, 2006

Jurnal :

Endang Retnowati. 2001. Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural; Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum. Volume XVI, No. 3, 153

Irawati, Oentoeng Wahjo. 2011. Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional di Perairan Australia. Mimbar Vol. XXXVII, No. 1, 12

Solihin, A. 2011. Hak Ekonomi Nelayan Tradisional Indonesia di Wilayah Perbatasan. Vol. 2 (6)

Sulaiman, M dkk,. 2014. Pembangunan Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional Di Aceh Dalam Kaitan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Secara Berkeadilan. Vol. 21, No. 2, 313

Ganewati Wuryandari. 2014. Menerobos Batas Nelayan Indonesia Di Perairan Ausstrlia: Permasalahan dan Prospek. Volume 11 No. 1 Juni 2014

Maria Sari Awida, 2016. Efektifitas MoU Box 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan Traditional Nusa Tenggara Timur. Fakultas Hukum, UAJ

Internet :

Bei Lele, 2015, "Ashmore Reef, Nelayan Rote, dan Masalah Pelintas Batas Perairan Indonesia-Australia, dalam <http://www.batasnegeri.com/ashmore-reef-nelayan-rote-dan-masalah-pelintas-batas-perairan-indonesia-australia-1974-2007>, di akses pada tanggal 2 Februari 2017, jam 07.28 WITA

Harmen Batubara, 2016, "Perbatasan, Australia Merampas Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Pulau Pasir", dalam <http://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-australia-merampas-hal-nelayan-indonesia-di-pulau-pasir/> di akses pada tanggal 6 Desember 2017, jam 01.57 WITA

Laensius Molan "Kisah Perahu-Perahu Nelayan yang Di Bakar oleh Australia" dalam <http://www.antaranews.com/berita/469831/kisah-perahu-perahu-nelayan-yang-dibakar-oleh-australia> di akses pada tanggal 27 Juli 2017, jam 21.07 WITA

Suara Pembaharuan, "Ashmore Reef Menggodanya Nelayan Indonesia" <http://www.suarapembaharuan.co.id> di akses pada tanggal 17 Juli 2017, jam 19.07 WITA

Lorens Molan “Tragedi Nelayan Tradisional Indonesia” dalam <http://kupang.tribunnews.com/2009/07/19/tragedi-nelayan-tradisional-indonesia> di akses pada tanggal 02 Agustus 2017, jam 02.12 WITA

Alfred Dama, “Kisah Perahu-Perahu Nelayan yang Dibakar oleh Australia” dalam <http://kupang.tribunnews.com/2014/12/18/kisah-perahu-perahu-nelayan-yang-dibakar-oleh-australia> di akses pada tanggal 03 Agustus 2017, jam 22.11 WITA

Najmu Laila, “Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Tradisional Menurut Hukum Laut Internasional”, <http://id.scribd.com/doc/214913607/Pengakuan-Terhadap-Hak-Penangkapan-Ikan-Tradisional-Traditional-Fishing-Rights-Menurut-Hukum-Laut-Internasional> di akses pada tanggal 21 Juli 2017, jam 09.17 WITA

Jimm Prescott: “Perlunya Kelesatarian Sumberdaya dan Lingkungan” dalam <http://www.moral-politik.com/2013/11/pslp-adakan-workshop-mou-box-di-rote/> diakses pada tanggal 06 September 2017, jam 00.12 WITA

Laurensius Molan, “Derita Nelayan Berakhir di Pengadilan Darwin” <https://sumsel.antaranews.com/berita/285004/index.html> Di Akses pada tanggal 07 Agustus 2017, jam 19.45 WITA

Catatan